



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru - Jakarta 12110, Telp. 021 - 72796823, Fax. 021 - 7296905



MODUL SAK ETAP TAHUN 2016



BUKU 2

Program Peningkatan Kapasitas
Kemitraan USAID - SECO

**Modul SAK ETAP
BUKU 2**

**LAPORAN KEUNGGAN PDAM
BERDASARKAN SAK ETAP**

**Program Peningkatan Kapasitas
Kemitraan USAID - SECO**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 PRINSIP DAN KARAKTERISTIK LAPORAN KEUANGA	I-1
---	-----

BAB 2 POS-POS NERACA DALAM SAK ETAP

2.1 PENGERTIAN	II-1
2.2 UNSUR – UNSUR LAPORAN NERACA	II-2
2.3 INFORMASI DISAJIKAN DI NERACA ATAU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	II-6

BAB 3 POS-POS LAPORAN LABA RUGI SAK ETAP

3.1 PENGERTIAN	III-1
3.2 UNSUR – UNSUR LAPORAN LABA RUGI	III-2
3.3 INFORMASI YANG DISAJIKAN DI LAPORAN LABA RUGI	III-4
3.3.1 Laporan laba rugi merupakan laporan kinerja keuangan PDAM yang mencakup pos-pos sebagai berikut:	III-4
3.3.2 PDAM Tidak Boleh Menyajikan atau Mengungkapkan Pos Pendapatan dan Beban Sebagai “Pos Luar Biasa”, Baik dalam Laporan Laba Rugi Maupun Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.....	III-5
3.4 ANALISIS BEBAN	III-5

BAB 4 LAPORAN PERUBAHAN MODAL, LAPORAN ARUS KAS, LABA DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SAK ETAP

4.1 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS SAK ETAP	IV-1
4.1.1 Tujuan	IV-1
4.1.2 Informasi yang Disajikan di Laporan Perubahan Ekuitas.....	IV-1
4.2 LAPORAN LABA RUGI DAN SALDO LABA.....	IV-4

4.3	LAPORAN ARUS KAS SAK ETAP	IV-6
4.3.1	Tujuan	IV-6
4.3.2	Informasi yang Disajikan di Laporan Arus Kas	IV-7
4.4	CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	IV-11
4.4.1	Tujuan	IV-11
4.4.2	Informasi Tentang Dasar Penyusunan Laporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Tertentu yang digunakan	IV-13

BAB 5 PERPAJAKAN PDAM

5.1	PENGERTIAN	V-1
5.2	UNSUR-UNSUR PAJAK	V-1
5.3	PEMBAGIAN PAJAK	V-3
5.4	SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK.....	V-4
5.5	ASAS PEMUNGUTAN PAJAK	V-5
5.6	PENDAFTARAN	V-7
5.7	PELAPORAN.....	V-9
5.8	PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21	V-12
5.9	PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN	V-12
5.10	KOREKSI FISKAL POSITIF DAN NEGATIF.....	V-14
5.11	PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 & 23.....	V-18
5.12	PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 (2)	V-19
5.13	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN).....	V-20

BAB 6 ANALISA LAPORAN KEUANGAN

6.1	PENGERTIAN	VI-1
-----	------------------	------

DAFTAR TABEL

2.1	Format Neraca	II-5
3.1	Format Laba Rugi Berdasarkan Sifat Beban	III-6
4.1	Format Laporan Perubahan Ekuitas	IV-3
4.2	Format Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba	IV-5
4.3	Format Laporan Arus Kas Metode Tdak Langsung	IV-9
6.1	Perhitungan Kinerja Aspek Keuangan PDAM Menurut Kepmendagri No.47 Tahun1999	VI-3
6.2	Rumus Perhitungan FCR	VI-8

DAFTAR GAMBAR

5.1	Format Perhitungan PPh Pasal 21	V-12
5.2	Format Perhitungan PPh Badan.....	V-14

BAB I PENDAHULUAN

Bab 4
Laporan
Perubahan Modal,
Laporan Arus Kas,
Laba dan Catatan
atas Laporan
Keuangan SAK
ETAP

Bab 5
Perpajakan PDAM

Bab 6
Analisa Laporan
Keuangan

**1.1 Prinsip dan Karakteristik
Laporan Keuangan**

BAB 1

PENDAHULUAN

Bab 1
Pendahuluan

Bab 2
Pos-Pos Neraca
dalam SAK ETAP

Bab 3
Pos-Pos Laba
Rugi SAK ETAP

1.1 Prinsip dan Karakteristik Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan output akhir dari proses akuntansi dan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, laba rugi, ekuitas, dan arus kas dari suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Lima komponen laporan keuangan utama, adalah neraca, laporan laba-rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, yaitu :

- Neraca menunjukkan posisi harta/kekayaan, kewajiban dan ekuitas pada saat tertentu.

- Laporan laba-rugi merupakan daftar yang menunjukkan pendapatan serta beban operasional entitas pada kurun waktu tertentu.
- Laporan arus kas merupakan daftar yang menunjukan dari mana kas perusahaan diperoleh dan digunakan untuk keperluan pembiayaan apa.
- Laporan perubahan ekuitas yaitu suatu daftar yang menunjukkan saldo awal ekuitas serta perubahan-perubahan yang terjadi.
- Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan rinci atas jumlah yang terdapat dalam laporan keuangan khususnya neraca dan laba rugi, serta prinsip dasar yang dianut dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan media penyampaian informasi bagi manajemen dan pihak –pihak lain yang berkepentingan terhadap operasi perusahaan (investor, bank, pemasok, pemma, dsb). Oleh karena itu laporan keuangan harus disajikan sedemikian rupa agar dapat membantu memenuhi kegunaannya secara efektif untuk kepentingan analisa, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selain itu terdapat laporan-laporan periodik lainnya yang diperlukan manajemen, semisal efisiensi kerja, jam kerja, jumlah produksi, efisiensi tagihan, biaya produksi, dan sebagainya.

Perusahaan yang telah *go public* harus tunduk terhadap persyaratan yang ditetapkan pada pedoman standar akuntansi dan keuangan (PSAK) yang merupakan aturan dasar untuk membuat laporan keuangan. Khusus untuk PDAM, laporan keuangan mengacu pada pedoman

akuntansi perusahaan daerah air minum, diterbitkan oleh kantor Menteri Negara Otonomi Daerah, tahun 2000 (dengan diberlakukannya SAK ETAP terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan, misalnya pos penyisihan piutang, pengelompokan aset dan kewajiban).

Beberapa prinsip penting di bawah ini harus diperhatikan dalam penyusunan laporan:

1. Lengkap

Laporan harus menyajikan informasi yang lengkap mengenai hasil kegiatan periode berjalan yang disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya dan dengan nilai proyeksi/anggaran. Penjelasan dan informasi tambahan yang dipandang perlu harus disertakan untuk menghindari adanya penafsiran yang menyesatkan.

2. Informatif

Laporan harus menyajikan informasi yang mudah dipahami oleh pemakai.

3. Relevan

Laporan keuangan harus berisi informasi-informasi penting yang tepat dan dapat memenuhi kebutuhan manajemen.

Akurat.

4. Laporan harus menyajikan informasi yang dapat diandalkan kecermatannya. Tepat waktu

5. Laporan harus disajikan tepat waktu yaitu segera setelah berakhirnya periode pelaporan.

Disamping beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan, perlu juga memiliki karakteristik kualitatif yang seharusnya dipenuhi, yaitu :

- a. Dapat dipahami
- b. Relevan
- c. Materialitas
- d. Keandalan
- e. Pertimbangan Sehat
- f. Kelengkapan
- g. Dapat Dibandingkan
- h. Tepat Waktu
- i. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Agar laporan dapat bermanfaat sebagaimana yang dikehendaki maka setiap jenjang manajemen yang menerima laporan wajib mengkaji laporan dimaksud dan mendapatkan penjelasan lebih lanjut terhadap hal-hal yang menyimpang dari rencana/anggaran dan/atau hal-hal yang meragukan. Hal ini diperlukan untuk terciptanya sistem pengendalian intern manajemen yang sehat dapat berjalan secara efektif.

Dalam Bab ini akan dibahas mengenai Pos-pos perkiraan dari masing-masing Laporan yang dibuat oleh PDAM, yaitu :

1. Neraca ;

Merupakan Laporan yang menunjukkan posisi harta/kekayaan, kewajiban dan ekuitas secara sistematis pada suatu saat tertentu.

a. *Aset ;*

adalah sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi masa sekarang dan masa mendatang yang dikuasai oleh perusahaan , dan dapat diukur dalam satuan uang. Contoh aset antara lain kas, piutang, persediaan, dan gedung / bangunan.

b. *Kewajiban ;*

Merupakan hak tagih kepada entitas oleh pihak III yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi perusahaan. Kewajiban mencakup utang yang berasal dari pinjaman, utang biaya, dan utang lainnya yang masih harus dibayar.

c. *Ekuitas ;*

Adalah hak residual perusahaan yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban perusahaan.

2. *Laporan Laba Rugi ;*

Merupakan suatu daftar yang menunjukkan pendapatan dan beban, serta laba yang diperoleh atau rugi yang diderita oleh perusahaan selama kurun waktu tertentu. Laporan ini merupakan upaya untuk mengukur hasil bersih dari operasi perusahaan selama kurun waktu tertentu, umumnya satu tahun, serta untuk mengetahui rincian dari mana laba diperoleh.

3. *Laporan Perubahan Ekuitas ;*

Merupakan laporan yang menyajikan posisi modal dasar pada suatu periode tertentu, yang dipengaruhi oleh jumlah laba atau rugi tahun sebelumnya dan laba atau rugi pada tahun berjalan.

SAK ETAP memperbolehkan penggabungan laporan laba rugi dengan laporan perubahan dalam satu laporan yang disebut "*Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba*" dengan syarat perubahan ekuitas terjadi karena adanya perubahan laba (pembagian deviden) dan koreksi-koreksi kesalahan tahun lalu.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas memberikan gambaran bagaimana perusahaan:

- Memperoleh kas dari kegiatan operasinya.
- Menggunakan kas untuk investasi.
- Mengelola pendanaan.

Kas dalam laporan arus kas sering diperluas pengertiannya menjadi kas dan setara kas (*cash and cash equivalent*), yaitu:

- Kas (*cash on hand*)
- Bank (*cash on bank*)
- Deposito berjangka (*unrestricted time deposit*)
- Surat berharga dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan (*short term investment < three months*)

Terdapat 2 metode dalam penyusunan Laporan Arus Kas , yaitu :

a. Metode langsung

Disusun dengan cara membuat rekapitulasi atas penerimaan dan pengeluaran kas/setara kas (Buku kas/ Buku kas cabang/buku Bank)

b. Metode tidak langsung

Disusun dengan cara membandingkan neraca perusahaan 2 tahun berturut-turut untuk mengetahui

kenaikan dan penurunan pos-pos yang terdapat dalam neraca (*SAK ETAP wajib dengan metode ini*)

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan bertujuan untuk :

- a. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
- b. Mengungkapkan informasi yang di syaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan.

BAB II

POS-POS NERACA DALAM SAK ETAP

Bab 4
Laporan
Perubahan Modal,
Laporan Arus Kas,
Laba dan Catatan
atas Laporan
Keuangan SAK
ETAP

Bab 5
Perpajakan PDAM

Bab 6
Analisa Laporan
Keuangan

BAB 2

POS-POS NERACA DALAM SAK ETAP

Bab 1
Pendahuluan

Bab 2
Pos-Pos Neraca
dalam SAK ETAP

Bab 3
Pos-Pos Laba
Rugi SAK ETAP

2.1 Pengertian

2.2 Unsur-unsur
Laporan Neraca

2.3 Informasi Disajikan di
Neraca atau Catatan Atas
Laporan Keuangan

2.1 Pengertian

Neraca (*balance sheet*), adalah daftar yang menyajikan posisi keuangan secara sistematis tentang aktiva (*assets*), kewajiban atau pasiva (*liabilities*) dan modal (*equity*) suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Neraca disajikan secara komparatif dengan neraca tahun sebelumnya.

Neraca perusahaan merupakan laporan keuangan yang menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik per tanggal tertentu. Pada neraca, aset ditempatkan disebelah kiri, sedangkan kewajiban dan ekuitas ada disebelah kanan. Bagian aset dalam neraca disusun berdasarkan urutan cepat lambatnya aset tersebut dikonversikan menjadi kas atau digunakan dalam operasi (berdasarkan urutan likuiditasnya). Pada bagian kewajiban, semua jenis kewajiban harus disajikan berdasarkan urutan waktu pembayarannya. Kewajiban yang harus segera diselesaikan disajikan pada urutan paling atas. Sedangkan pada bagian ekuitas pemilik, Karena jenis perusahaannya adalah perorangan, maka hanya ada satu modal pemilik.

2.1 Pengertian

2.2 Unsur-unsur Laporan Neraca

2.3 Informasi Disajikan di Neraca atau Catatan Atas Laporan Keuangan

2.2 Unsur – Unsur Laporan Neraca

Neraca keuangan disusun berdasarkan pada rekaman data transaksi yang valid yang telah diolah , yaitu:

- Laporan arus kas, dimana saldo akhir dari laporan arus kas akan menjadi salah satu pos di neraca, yaitu aktiva lancar (kas)
- Laporan laba-rugi, dimana laba bersih dari laporan laba-rugi menjadi salah satu pos di neraca, yaitu bagian dari ekuitas (Laba atau rugi tahun berjalan)

Format standar neraca menggambarkan aset perusahaan pada sisi kiri halaman, yang umumnya disebut sebagai “debet”, serta kewajiban (utang) dan modal dicatat pada sisi kanan (kredit), yang dapat dinyatakan melalui persamaan:

$$\text{Total Aktiva (aset)} = \text{Kewajiban} + \text{Ekuitas}$$

1. Aktiva (*asset*)

Aktiva (aset) adalah saldo debet (*debit balance*) yang berisi segala sesuatu yang dimiliki/dikuasai perusahaan. Aset terbagi dalam dua kategori, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar.

a. Aktiva lancar (*current assets*)

Aset lancar adalah aset yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Diperkirakan akan direalisasikan atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan
- Dimiliki untuk diperdagangkan
- Diharap akan direalisasi dalam kurun waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan atau

- Berupa kas/setara kas kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya dalam kurun waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan

(SAK ETAP paragraph 4.6)

b. Aset tidak lancar

Perusahaan mengklasifikasikan semua aset lainnya yang tidak memenuhi kriteria aset lancar sebagai aset tidak lancar.

(SAK ETAP paragraph 4.7)

2. Kewajiban (*Liabilities*)

Karakteristik dari kewajiban adalah perusahaan mempunyai kewajiban masa kini untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu, kewajiban dapat berupa kewajiban hukum dan konstruktif, kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan, kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan perusahaan ketika :

- Oleh praktek baku masa lalu kebijakan yang dipublikasikan atau pernyataan kini yang cukup spesifik, perusahaan telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa perusahaan akan menerima tanggung jawab tertentu; dan
- Akibatnya perusahaan telah menimbulkan ekspektasi kuat dan sah kepada pihak lain bahwa perusahaan akan melaksanakan tanggung jawab tersebut.

(SAK ETAP paragraph 2.17)

Kewajiban diklasifikasikan dalam 2 kelompok besar yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, berikut penjelasannya :

a. Kewajiban jangka pendek

Dicatat sebagai kewajiban jangka pendek bilamana memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Diperkirakan akan diselesaikan dalam kurun waktu siklus normal operasi perusahaan;
- Kewajiban akan diselesaikan kurun waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau
- Perusahaan tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

(SAK ETAP Paragraph 4.8)

b. Kewajiban jangka panjang

Perusahaan mengklasifikasikan seluruh kewajiban yang tidak memenuhi kriteria kewajiban jangka pendek sebagai kewajiban jangka panjang. *(SAK ETAP paragraph 4.9)*

3. Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh kewajibannya, ekuitas mungkin di sub klasifikasikan semisal modal saham, laba rugi tahun lalu, laba rugi tahun berjalan *(SAK ETAP paragraph 2.19)*

Tabel 2.1
FORMAT NERACA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN/KOTA "XX"
NERACA
PER 31 DESEMBER ..X1 DAN ..X0

URAIAN	..X1	..X0	URAIAN	..X1	..X0
ASET LANCAR : <ul style="list-style-type: none"> • Kas dan bank • Investasi jangka pendek • Piutang usaha • Persediaan • Pembayaran dimuka <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">Jumlah aset lancar</p>			KEWAJIBAN JANGKA PENDEK <ul style="list-style-type: none"> • Utang usaha • Utang non usaha • Biaya yang masih harus dibayar • Pendapatan diterima dimuka • Pinjaman jangka pendek • Utang jangka panjang jatuh tempo • Utang bunga • Utang iuran pensiun <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">Jumlah kewajiban jangka pendek</p>		
ASET TIDAK LANCAR ASET TETAP <ul style="list-style-type: none"> • Nilai perolehan • Akumulasi penyusutan <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">Nilai buku</p> <p>Aktiva tetap leasing</p>			KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Kewajiban jangka panjang: <ul style="list-style-type: none"> • Pinjaman dalam negeri • Pinjaman luar negeri • Bunga masa tenggang • Utang leasing <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">Jumlah kewajiban jangka Panjang</p>		
ASET TIDAK LANCAR LAINNYA <ul style="list-style-type: none"> • Aset tak berwujud <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">Jumlah aset tidak lancar</p>			EKUITAS : <ul style="list-style-type: none"> • Kekayaan Pemda yang dipisahkan • Penyertaan pemerintah yg belum berstatus • Modal • Modal hibah • Cadangan • Laba ditahan / (akumulasi kerugian) • Laba (rugi) tahun berjalan <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">Jumlah ekuitas</p>		
JUMLAH AKTIVA			JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL		

2.1 Pengertian

2.2 Unsur-unsur Laporan Neraca

2.3 Informasi Disajikan di Neraca atau Catatan Atas Laporan Keuangan

Format tersebut di atas sebagai contoh pos-pos yang berbeda baik sifat atau fungsinya untuk menjamin penyajian yang terpisah dalam neraca. Dalam prakteknya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Pos yang terpisah akan dibentuk jika :

- a. Ukuran, sifat, atau fungsi dari pos terhadap pos-pos yang sudah ada membuat penyajian terpisah menjadi relevan untuk memahami posisi keuangan entitas; dan
- b. Pertimbangan atas pos-pos tambahan yang disajikan secara terpisah berdasarkan pada penilaian:
 - 1) sifat dan likuiditas aset;
 - 2) fungsi aset dalam perusahaan; dan
 - 3) jumlah, sifat dan waktu kewajiban.

2.3 Informasi Disajikan di Neraca atau Catatan Atas Laporan Keuangan

PDAM mengungkapkan di neraca atau catatan atas laporan keuangan, subklasifikasi atas pos yang disajikan:

- a. Kelompok aset tetap: aset tetap terdiri dari apa saja dan berapa masing masing jumlahnya
- b. Jumlah piutang usaha, piutang dari pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, pelunasan dipercepat dan jumlah lainnya
- c. Persediaan: persediaan terdiri dari persediaan apa saja dan jumlahnya masing-masing
- d. Kewajiban imbalan kerja dan kewajiban diestimasi lainnya: diuraikan jenis kewajiban imbalan yang ada juga kewajiban diestimasi yang ada
- e. Kelompok ekuitas seperti modal disetor, tambahan modal

disetor, jenis penyertaan, saldo laba, pendapatan dan beban yang diakui langsung ke ekuitas

Neraca mempunyai peranan penting dalam suatu perusahaan, selain sebagai salah satu komponen penting laporan keuangan, pos-pos yang terdapat dalam neraca merupakan unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan suatu perusahaan, yaitu aktiva, kewajiban dan ekuitas. Dari angka-angka yang terdapat pada pos-pos tersebut dapat dibuat analisis rasio keuangan yang merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang ditunjukkan untuk menggambarkan perubahan kondisi keuangan untuk kemudian menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan.

Pada dasarnya angka-angka yang terdapat dalam neraca dapat membantu manajemen untuk menghitung rasio yang dapat disusun dari neraca adalah *current ratio*, *quick ratio* dan *cash ratio*.

Penjelasan lebih lanjut perhitungan rasio diatas adalah sebagai berikut :

1. *Current Ratio* adalah perbandingan antara jumlah aktiva lancar dengan hutang lancar.

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100 \%$$

(Munawir, 2001)

Current Ratio ini menunjukkan tingkat keamanan kreditor jangka pendek atau kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang tersebut. Jika suatu perusahaan tingkat persentase rasio tinggi, belum tentu dapat menjamin

akan dibayarnya hutang perusahaan yang sudah jatuh tempo. Hal ini dikarenakan adanya jumlah persediaan yang relatif tinggi dibandingkan taksiran tingkat penjualan yang akan datang sehingga tingkat perputaran persediaan rendah. Semakin kecil hutang lancar maka semakin besar persentase *current ratio*.

2. *Quick Ratio* adalah perbandingan antara (aktiva lancar – persediaan) dengan hutang lancar.

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aktiva lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang lancar}} \times 100\%$$

(Munawir 2001)

Quick Ratio merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dengan tidak memperhitungkan persediaan, karena persediaan memerlukan waktu yang relatif lama untuk direalisasi menjadi uang kas, walaupun kenyataannya mungkin persediaan lebih likuid daripada piutang. Rasio ini lebih tajam daripada *Current Ratio*, karena hanya membandingkan aktiva yang sangat likuid dengan hutang lancar. Jika *Current Ratio* tinggi tapi *Quick Ratio* nya rendah, menunjukkan adanya investasi yang sangat besar dalam persediaan.

Current Ratio dan *Quick Ratio* adalah untuk mengukur **Rasio Likuiditas**, yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

3. *Debt to Equity Ratio* ; untuk mengukur resiko, memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat resiko tak tertagihnya suatu utang.

$$\text{Debt to Equity Ratio} : \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

(Dwi Prasetyo, 2011)

Rumus diatas dapat diasumsikan bahwa apabila suatu Perusahaan menetapkan bahwa *Total Debt to Equity Ratio* yang harus dipertahankan dalah 1 : 2 atau 200%, ini berarti bahwa setiap total utang sebesar Rp 1,00 harus dijamin dengan modal sendiri sebesar Rp 2,00.

4. *Debt to Total Asets Ratio* ; yaitu perbandingan antara total utang (hutang lancar dan hutang jangka panjang) dengan total aset. Rasio ini menunjukkan berapa bagian keseluruhan aset yang dibelanjai oleh hutang.

$$\text{Debt to Total Asets Ratio} : \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

(Dwi Prasetyo, 2011)

Dalam mengartikan rumus diatas dapat menggunakan asumsi bahwa apabila perusahaan menetapkan bahwa *Total Debt to total Asets ratio* yang harus dipertahankan adalah 1 : 3 atau 300% ini berarti bahwa setiap total utang sebesar Rp 1,00 dijamin dengan total aset sebesar Rp 3,00.

Analisis *Debt to Equity Ratio* dan *Total Debt to total Asets ratio* adalah untuk menghitung analisis **Rasio Solvabilitas**, yang merupakan analisis yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan dikatakan *solvable* apabila perusahaan mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya.

BAB III
POS-POS LAPORAN LABA RUGI SAK ETAP

Bab 4
Laporan
Perubahan Modal,
Laporan Arus Kas,
Laba dan Catatan
atas Laporan
Keuangan SAK
ETAP

Bab 5
Perpajakan PDAM

Bab 6
Analisa Laporan
Keuangan

3.1 Pengertian

- 3.2 Unsur-unsur Laporan Laba Rugi
- 3.3 Informasi Yang Disajikan di Laporan Laba Rugi
 - 3.3.1 Laporan laba rugi merupakan laporan kinerja keuangan PDAM yang mencakup pos-pos
 - 3.3.2 PDAM tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai "pos luar biasa", baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan
- 3.4 Analisis Beban

BAB 3

POS-POS LAPORAN LABA RUGI SAK ETAP

Bab 1
Pendahuluan

Bab 2
Pos-Pos Neraca
dalam SAK ETAP

Bab 3
Pos-Pos Laba
Rugi SAK ETAP

3.1 Pengertian

Laporan laba-rugi adalah suatu laporan yang mencantumkan informasi mengenai pendapatan dan beban, serta laba yang diperoleh atau rugi yang diderita oleh perusahaan selama suatu periode tertentu. Laporan ini merupakan upaya untuk mengukur hasil bersih dari operasi perusahaan selama kurun waktu tertentu, biasanya selama tiga bulan atau satu tahun, serta untuk melihat rincian darimana laba diperoleh.

$$\text{Total Pendapatan} - \text{Beban} = \text{Laba / Rugi}$$

Laporan laba-rugi (*profit and loss statement*) merupakan ringkasan dari pendapatan yang diterima perusahaan dengan beban operasional yang terjadi karena adanya penjualan dan beban operasional pada periode yang sama. Laporan laba-rugi atau laporan pendapatan (*income statement*) tidak bersifat seketika atau tunai (*cash basis*), melainkan bersifat

3.1 Pengertian

3.2 Unsur-unsur Laporan Laba Rugi

3.3 Informasi Yang Disajikan di Laporan Laba Rugi

3.3.1 Laporan laba rugi merupakan laporan kinerja keuangan PDAM yang mencakup pos-pos

3.3.2 PDAM tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai "pos luar biasa", baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan

3.4 Analisis Beban

akumulatif (*accrual*). Disajikan secara komparatif dengan perhitungan laba-rugi tahun lalu.

3.2 Unsur – Unsur Laporan Laba Rugi

Laporan laba-rugi disusun berdasarkan rekaman data transaksi yang valid dengan menggunakan format standar yang telah ditetapkan. Sumber data penyusunan laporan laba-rugi adalah saldo sesuai buku besar, dan didukung dengan daftar rincian beban yang terjadi pada tiap kelompok beban PDAM, yang dibedakan atas beban operasi dan pemeliharaan. Untuk beban penyusutan dan amortisasi, digabung seluruhnya dan dikelompokkan dalam pos-pos tersendiri.

Prinsip (pos-pos) yang umum terdapat pada laporan laba-rugi adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan

Menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok perusahaan (penjualan air). Pendapatan dari penjualan air (pendapatan operasi) disajikan secara terpisah dengan pendapatan non air, untuk melihat sampai seberapa besar hasil yang diperoleh dari kegiatan utama perusahaan dan sampai seberapa jauh hasil sampingannya. Dengan demikian kita akan mengetahui kualitas laba perusahaan dengan melihat perbandingan kedua jenis pendapatan tersebut. Pendapatan operasi diharapkan mendominasi pendapatan perusahaan.

Pendapatan; merupakan peningkatan manfaat ekonomis yang timbul dari aktivitas normal PDAM selama suatu periode yang menghasilkan arus kas masuk, bertambahnya

aset, dan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal, meliputi :

- pendapatan air dan non air.
- pendapatan penggunaan aset oleh pihak lain yang menghasilkan sewa, bunga, royalti, dividen.
- pendapatan penjualan lain seperti sambungan langganan baru.

2. Beban

Mencakup beban yang timbul dalam rangka pelaksanaan aktivitas perusahaan, terdiri dari **(berdasarkan fungsi beban)** :

- a. Beban langsung usaha atau biaya operasional yang diperlukan dalam pengelolaan, yaitu : beban sumber air baku, beban pengolahan air, beban transmisi dan distribusi.
- b. Beban tidak langsung , terdiri dari beban umum dan administrasi, misalnya beban personalia, bagian umum, direksi, dan lain-lain.

Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aset seperti kas dan setara kas, persediaan, dan aset tetap.

3. Pendapatan dan biaya lain-lain

Pendapatan yang sifatnya non operasional (di luar kegiatan pokok perusahaan) dikelompokkan sebagai pendapatan lain-lain sesuai yang telah dijelaskan pada sub bab 4.1.3. Demikian juga beban lain-lain adalah beban di luar kegiatan pokok perusahaan, sebagaimana diuraikan pada sub bab

3.1 Pengertian

3.2 Unsur-unsur Laporan Laba Rugi

3.3 Informasi Yang Disajikan di Laporan Laba Rugi

3.3.1 Laporan laba rugi merupakan laporan kinerja keuangan PDAM yang mencakup pos-pos

3.3.2 PDAM tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai "pos luar biasa", baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan

3.4 Analisis Beban

4.1.2.3. Hal ini dilakukan untuk memisahkan pendapatan lain-lain dari kegiatan utama, sehingga laporan keuangan dapat lebih fokus.

4. Perhitungan laba-rugi

Dihitung secara bertahap sehingga diperoleh laba bersih sebelum pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan pada perusahaan yang memperoleh laba.

Laba bersih sering juga disebut sebagai *net income* atau *bottom line*. Laba bersih inilah yang merupakan hak pemilik. Laba bersih akan menambah saldo laba apabila tidak dibagi sebagai dividen. Dividen dibagi sesuai dengan hasil rapat umum pemegang saham (RUPS). Namun demikian tidak selalu perusahaan membagi dividen.

3.3 Informasi Yang Disajikan di Laporan Laba Rugi

3.3.1 Laporan laba rugi merupakan laporan kinerja keuangan PDAM yang mencakup pos-pos sebagai berikut:

a. Pendapatan

merupakan peningkatan manfaat ekonomis yang timbul dari aktivitas normal PDAM selama suatu periode yang menghasilkan arus kas masuk, bertambahnya aset, dan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal, meliputi :

- Pendapatan air dan non air,
- Pendapatan penggunaan aset oleh pihak lain yang menghasilkan sewa, bunga, royalti, dividen
- Pendapatan penjualan lain seperti sambungan langganan baru.

3.1	Pengertian
3.2	Unsur-unsur Laporan Laba Rugi
3.3	Informasi Yang Disajikan di Laporan Laba Rugi
3.3.1	Laporan laba rugi merupakan laporan kinerja keuangan PDAM yang mencakup pos-pos
3.3.2	PDAM tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai "pos luar biasa", baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan
3.4	Analisis Beban

b. Beban

Merupakan penurunan manfaat ekonomis selama suatu periode akuntansi yang menghasilkan arus kas keluar, berkurangnya aset, atau terjadinya kewajiban yang berakibat penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal, meliputi:

(berdasarkan fungsi beban)

- beban sumber air,
- beban pengolahan air,
- beban transmisi dan distribusi,
- beban umum dan administrasi.

c. Beban pajak

Merupakan jumlah pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan perpajakan berdasarkan laba yang diperoleh.

d. Laba atau Rugi neto

Adalah Jumlah residual yang tersisa setelah pendapatan dikurangi beban dan pajak.

3.3.2 PDAM tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai "pos luar biasa", baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan

3.4 Analisis Beban

Berdasarkan SAK ETAP (paragraph 5.6; 5.7 dan 5.8) Perusahaan dianjurkan menyajikan klasifikasi beban dalam laporan laba rugi berdasarkan sifat beban, bilamana penyajian beban berdasarkan fungsi beban maka wajib mengungkap dalam informasi tambahan berdasarkan sifat beban.

Tabel 3.1
FORMAT LABA RUGI BERDASARKAN SIFAT BEBAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN/KOTA "XX"
LAPORAN LABA RUGI
PER 31 DESEMBER ..X1 DAN ..X0

URAIAN	..X1	..X0
PENDAPATAN USAHA :		
Pendapatan air		
Pendapatan non air		
- pendapatan sambungan baru;		
- Pendapatan dana meter;		
- pendapatan sewa instalasi;		
- pendapatan pemeriksaan air lab;		
- pendapatan penyambungan kembali;		
- pendapatan pemeriksaan instalasi pelanggan;		
- pendapatan penggantian meter rusak;		
- pendapatan administrasi;		
- Pendapatan denda;		
- pendapatan penggantian pipa persil;		
- Pendapatan non usaha lainnya;		
Pendapatan Lain-lain		
Jumlah Pendapatan		
BEBAN USAHA		
Beban operasional sumber air		
Beban pegawai		
Beban BBM		
Beban listrik		
Beban transportasi		
Beban komunikasi		
Beban penyusutan dan amortisasi		
Beban penyisihan		
Beban penurunan nilai		
Beban pemeliharaan sumber/IPA/inst Distrans		
Beban bunga		
Beban operasi lainnya		
Jumlah Beban Operasi		
Laba Operasi		

Seperti juga Laporan Neraca, Laporan Laba Rugi dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kemampuan keuangan perusahaan, yaitu :

1. *Net Rate of Return On Investment* ; Mengukur tingkat pengembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan, baik dengan menggunakan total aktiva yang dimiliki perusahaan maupun dengan dana yang berasal dari pemilik modal. *Net Rate of Return On Investment* adalah perbandingan antara laba bersih sebelum pajak dengan total aktiva usaha. Suatu perusahaan dikatakan baik atau tidak baik dapat dilihat dari *Net Rate of Return On Investment* dan rentabilitas Modal sendiri.

$$\text{Net Rate of ROI} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

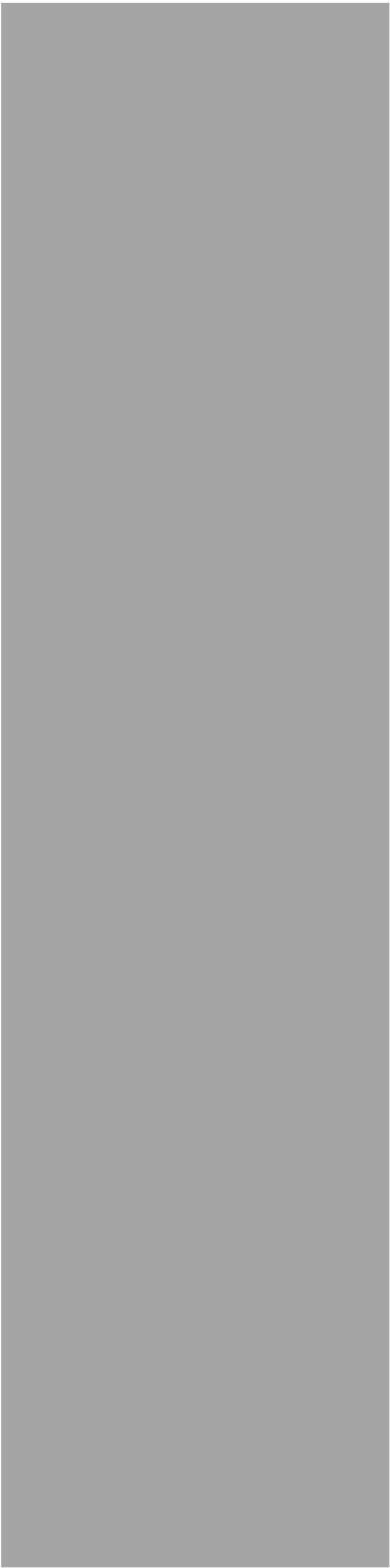
(Munawir, 2011:105)

2. *Return On Equity* ; adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba perusahaan yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan.

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

(Dwi Prastowo, 2011:92)

Net Rate of Return On Investment dan *Return On Equity* adalah rasio yang dihitung untuk mengukur Rasio Rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba perusahaan selama periode tertentu. Rentabilitas perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aset nya secara



produktif. Dengan demikian rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan memperbandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah atau modal perusahaan tersebut.

BAB IV
**LAPORAN PERUBAHAN MODAL, LAPORAN ARUS KAS,
LABA DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SAK
ETAP**

Bab 4
Laporan
Perubahan Modal,
Laporan Arus Kas,
Laba dan Catatan
atas Laporan
Keuangan SAK
ETAP

Bab 5
Perpajakan PDAM

Bab 6
Analisa Laporan
Keuangan

- 4.1 Laporan Perubahan Ekuitas SAK ETAP**
- 4.1.1 Tujuan**
- 4.1.2 Informasi yang Disajikan di Laporan Perubahan Ekuitas**
- 4.2 Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba rugi
- 4.3 Laporan Arus Kas SAK ETAP
- 4.3.1 Tujuan
- 4.3.2 Informasi yang Disajikan di Laporan Arus Kas
- 4.4 Catatan Atas Laporan Keuangan
- 4.4.1 Tujuan
- 4.4.2 Informasi Tentang Dasar Penyusunan Laporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Tertentu yang Digunakan

BAB 4

LAPORAN PERUBAHAN MODAL, LAPORAN ARUS KAS, LABA DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SAK ETAP

Bab 1
Pendahuluan

Bab 2
Pos-Pos Neraca
dalam SAK ETAP

Bab 3
Pos-Pos Laba
Rugi SAK ETAP

4.1 Laporan Perubahan Ekuitas SAK ETAP


4.1.1 Tujuan

Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi PDAM yang memuat pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas, pengaruh **perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui, jumlah** investasi dan distribusi lain ke pemilik modal selama periode tersebut.

4.1.2 Informasi yang Disajikan di Laporan Perubahan Ekuitas

PDAM menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan:

- a. Laba atau rugi untuk periode pelaporan;
- b. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;

- 
- c. Pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui pada tiap komponen modal;
 - d. Rekonsiliasi setiap komponen modal antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, yang diungkapkan secara terpisah yang berasal dari:
 - Laba atau Rugi;
 - Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;
 - Jumlah investasi, dividen dan distribusi lain ke pemilik modal, yang disajikan terpisah dari dividen dan distribusi lainnya ke pemilik modal, serta perubahan kepemilikan PDAM yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian.

Tabel 4.1
FORMAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN/KOTA "XX"
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 20XI DAN 20X0

Uraian	Kekayaan Pemda yang dipisahkan	Penyertaan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya	Akumulasi Kerugian	Laba(Rugi) tahun berjalan	Jumlah Ekuitas
Saldo per 1 Januari 20X0	Xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
KoreksiSaldoAwalLabaRugiTahun 20x0 - Koreksi Audit - MutasiTahunBerjalan	----- Xxxx	----- xxxx	----- xxxx	----- xxxx	----- xxxx
Saldo per 31 Desember 20X0	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Koreksi SaldoAwal LabaRugiTahun 20x1 - Koreksi Audit - MutasiTahunBerjalan	----- xxxx	----- xxxx	----- xxxx	----- xxxx	----- xxxx
Saldo per 31 Desember 20X2	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxx

4.1 Laporan Perubahan Ekuitas SAK ETAP

4.1.1 Tujuan

4.1.2 Informasi yang Disajikan di Laporan Perubahan Ekuitas

4.2 Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba rugi

4.3 Laporan Arus Kas SAK ETAP

4.3.1 Tujuan

4.3.2 Informasi yang Disajikan di Laporan Arus Kas

4.4 Catatan Atas Laporan Keuangan

4.4.1 Tujuan

4.4.2 Informasi Tentang Dasar Penyusunan Laporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Tertentu yang Digunakan

4.2 Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba

Laporan ini merupakan penggabungan laporan Laba Rugi dan Laporan Perubahan Ekuitas dengan syarat perubahan ekuitas terjadi karena :

- Adanya laba atau rugi tahun berjalan
- Pembayaran deviden
- Koreksi kesalahan periode lalu
- Perubahan kebijakan akuntansi

Adapun informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi dan saldo laba, meliputi :

- Saldo laba awal periode
- Penyajian kembali setelah koreksi kesalahan periode lalu
- Penyajian kembali setelah koreksi perubahan kebijakan akuntansi
- Saldo laba pada akhir periode pelaporan

Contoh :

Tabel 4.2
FORMAT LAPORAN LABA RUGI DAN SALDO LABA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN/KOTA "XX"
LAPORAN LABA RUGI DAN SALDO LABA
TAHUN 20XI DAN 20X0

U R A I A N	Th 20....	Th. 20....
Pendapatan air		
Pendapatan Non air		
Pendapatan Lain-lain		
Total Pendapatan usaha		
Beban pemeliharaan		
Beban Pegawai		
Beban Penyusutan		
Beban Penyisihan		
Beban operasional lainnya		
Total Beban operasional		
Laba sebelum pajak		
PPH Badan		
Laba setelah pajak		
Saldo laba tahun lalu/laba ditahan		
Koreksi		
Pembagian Deviden		
Saldo laba per 31 Desember 20		

4.1 Laporan Perubahan Ekuitas SAK ETAP

4.1.1 Tujuan

4.1.2 Informasi yang Disajikan di Laporan Perubahan Ekuitas

4.2 Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba rugi

4.3 Laporan Arus Kas SAK ETAP

4.3.1 Tujuan

4.3.2 Informasi yang Disajikan di Laporan Arus Kas

4.4 Catatan Atas Laporan Keuangan

4.4.1 Tujuan

4.4.2 Informasi Tentang Dasar Penyusunan Laporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Tertentu yang Digunakan

4.3 Laporan Arus Kas SAK ETAP

Laporan arus kas memberikan gambaran aktivitas perolehan dan penggunaan kas kurun waktu operasional perusahaan, umumnya 1 tahun, berisikan:

- Perolehan kas dari aktivitas operasi.
- Penggunaan Kas untuk operasional dan investasi.
- Efektivitas dan efisiensi pengelolaan kas.

Kas dalam laporan arus kas sering diperluas pengertiannya menjadi kas dan setara kas (*cash and cash equivalent*), yaitu:

- Kas (*cash on hand*)
- Bank (*cash on bank*)
- Deposito berjangka kurang dari 3 bulan (*unrestricted time deposit*)
- Surat berharga dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan (*short term investment < three months*)

Persyaratan penting terkait kas/setara kas adalah kas/setara kas yang bebas penggunaannya setidaknya untuk kurun waktu satu tahun setelah periode pelaporan, semisal Deposito dengan jangka waktu 3 tahun tidak termasuk dalam klasifikasi setara kas, atau saldo kas yang dicadangkan untuk membayar kewajiban atau untuk investasi

4.3.1 Tujuan

Laporan Arus Kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas PDAM yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi

selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

4.3.2 Informasi yang Disajikan di Laporan Arus Kas

Informasi yang disajikan dalam laporan arus kas PDAM menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk satu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

Dalam laporan arus kas, aktivitas dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Aktivitas operasi

Adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam memperoleh laba, atau aktivitas rutin perusahaan, antara lain:

- Menjual barang (dalam hal ini menjual air)
- Membeli barang (jasa) dari pemasok (*supplier*)
- Membayar biaya operasi (gaji, sewa, asuransi, dll)
- Membayar bunga utang
- Membayar pajak

Secara umum arus kas operasi diharapkan positif, artinya lebih banyak kas dihasilkan dari kegiatan operasi dibandingkan yang digunakan untuk kegiatan operasi.

2. Aktivitas investasi

Terkait dengan aktivitas pembiayaan investasi dan sumber dana yang diperoleh untuk melakukan investasi perusahaan, antara lain:

- Memperoleh atau menjual aktiva tetap.

- Membeli atau menjual anak perusahaan.
- Meminjamkan dana atau memperoleh kembali aktiva tetap.

Inti dari aktivitas investasi adalah bagaimana perusahaan mengamankan kapasitas operasinya. Pembelian aktiva tetap dapat bertujuan untuk mengganti peralatan atau menambah peralatan. Pembelian anak perusahaan berarti perusahaan menambah kapasitas operasinya secara tidak langsung.

Tabel 4.3
FORMAT LAPORAN ARUS KAS METODE TIDAK LANGSUNG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN/KOTA "XX"
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER ..X1 DAN ..X0

Namaakun	...X1	...X0	Lebih/(kurang)	
			Jumlah	%
Arus kas dari aktivitas operasi: <ul style="list-style-type: none"> • Laba sebelum pajak dan pos luar biasa • Penyesuaian: - penyusutan - beban bunga • Kenaikan (penurunan) utang lancar • Penurunan (kenaikan) aktiva lancar 				
Arus kas bersih dari aktivitas operasi				
Arus kas dari aktivitas investasi <ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan dari aktivitas investasi • Pengeluaran dari aktivitas investasi 				
Arus kas bersih dari aktivitas investasi				
Arus kas dari aktivitas pendanaan <ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan dari aktivitas pendanaan • Pengeluaran dari aktivitas pendanaan 				
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan				
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas				
Saldo awal kas dan setara kas				
Saldo akhir kas dan setara kas				

Pada umumnya arus kas investasi adalah negatif, artinya perusahaan yang normal cenderung untuk menambah kapasitas, sementara perusahaan yang kesulitan likuiditas cenderung menjual asetnya.

3. Aktivitas pendanaan

Pendanaan (*financing*) terkait dengan pengelolaan sumber dana perusahaan, termasuk di dalamnya adalah:

- Mendapat pinjaman dan membayarnya kembali
- Menerbitkan saham
- Membayar dividen

Pola arus pendanaan tidak pasti, dapat positif atau negatif. Beberapa aktivitas pendanaan bersifat tidak rutin, misalnya penerbitan saham, penerbitan obligasi. Aktivitas yang tidak rutin tersebut umumnya menimbulkan lonjakan jumlah yang cukup besar.

Terdapat dua metode laporan arus kas, yaitu metode langsung (*direct method*) dan metoda tidak langsung (*indirect method*). Perbedaan format hanya pada format pelaporan arus kas dari aktivitas operasi saja. Pada metode langsung, sumber data adalah laporan harian kas dan bank. Pengisian pos-pos dalam laporan metode ini adalah dengan memindahkan data pada laporan harian kas dan bank kurun waktu 1 (satu) tahun kedalam laporan arus kas. Sumber data lainnya adalah anggaran arus kas serta laporan arus kas periode lalu.

Sedangkan pada metode tidak langsung, sumber data yang digunakan pada laporan ini adalah data neraca, untuk melihat kenaikan atau penurunan aset lancar dan

4.1	Laporan Perubahan Ekuitas SAK ETAP
4.1.1	Tujuan
4.1.2	Informasi yang Disajikan di Laporan Perubahan Ekuitas
4.2	Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba rugi
4.3	Laporan Arus Kas SAK ETAP
4.3.1	Tujuan
4.3.2	Informasi yang Disajikan di Laporan Arus Kas
4.4	Catatan Atas Laporan Keuangan
4.4.1	Tujuan
4.4.2	Informasi Tentang Dasar Penyusunan Laporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Tertentu yang Digunakan

kewajiban jangka pendek, selanjutnya dipindahkan kedalam laporan arus kas. Sedangkan format untuk arus kas investasi dan pendanaan tidak memiliki perbedaan.

4.4 Catatan Atas Laporan Keuangan

4.4.1 Tujuan

Catatan atas laporan keuangan bertujuan untuk:

- a. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan, dalam SAK ETAP wajib menyatakan kepatuhan kepada SAK ETAP yang artinya laporan keuangan secara keseluruhan mengikuti ketentuan SAK ETAP;
- b. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dibagian manapun dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas;
- c. Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dibagian manapun dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

PDAM membuat referensi silang atas setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk informasi yang terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

Urutan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

4.1	Laporan Perubahan Ekuitas SAK ETAP
4.1.1	Tujuan
4.1.2	Informasi yang Disajikan di Laporan Perubahan Ekuitas
4.2	Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba rugi
4.3	Laporan Arus Kas SAK ETAP
4.3.1	Tujuan
4.3.2	Informasi yang Disajikan di Laporan Arus Kas
4.4	Catatan Atas Laporan Keuangan
4.4.1	Tujuan
4.4.2	Informasi Tentang Dasar Penyusunan Laporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Tertentu yang Digunakan

- Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK ETAP;
- Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan;
- Informasi tambahan untuk pos-pos yang disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, sesuai dengan urutan penyajian laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut; dan
- Pengungkapan lain, misalnya:
 - Kewajiban kontinjensi, atau
 - Komitmen kontraktual yang belum diakui, atau
 - Pengungkapan informasi non keuangan misalnya: kebijakan manajemen risiko keuangan, ketidakpastian atas keberlangsungan hidup perusahaan.

4.4.2 Informasi Tentang Dasar Penyusunan Laporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Tertentu yang Digunakan

PDAM wajib mengungkapkan:

- Pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan nilai historis dan nilai wajar;
- Kebijakan akuntansi yang digunakan yang relevan untuk memahami laporan keuangan, misalnya: kebijakan akuntansi untuk aset tetap, persediaan, dan lain-lain;
- Informasi mengenai asumsi pokok tentang masa depan dan sumber-sumber pokok lain untuk

mengestimasi ketidakpastian pada akhir periode pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang menyebabkan adanya suatu penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan kewajiban dalam laporan keuangan tahun berikutnya. Terkait aset dan kewajiban tersebut, catatan atas laporan keuangan harus memasukkan rincian tentang sifat dan jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan.

Contoh: Kewajiban estimasi yang bergantung pada masa depan dari proses litigasi yang masih berjalan, kewajiban dana pensiun, kewajiban jasa pengabdian, dan kewajiban pesangon pemutusan hubungan kerja.

Pertimbangan secara terpisah dari hal-hal yang melibatkan estimasi dalam ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan atau catatan atas laporan keuangan lainnya yang digunakan manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

BAB V PERPAJAKAN PDAM

Bab 4
Laporan
Perubahan Modal,
Laporan Arus Kas,
Laba dan Catatan
atas Laporan
Keuangan SAK
ETAP

Bab 5
Perpajakan PDAM

Bab 6
Analisa Laporan
Keuangan

5.1 Pengertian

5.2 Unsur-Unsur Pajak

- 5.3 Pembagian Pajak
- 5.4 Sistem Pemungutan Pajak
- 5.5 Asas Pemungutan Pajak
- 5.6 Pendaftaran
- 5.7 Pelaporan
- 5.8 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
- 5.9 Pajak Penghasilan Badan
- 5.10 Koreksi Fiskal Positif dan Negatif
- 5.11 Pajak Penghasilan Pasal 22, 23
- 5.12 Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2)
- 5.13 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

BAB 5

PERPAJAKAN PDAM

Bab 1
Pendahuluan

Bab 2
Pos-Pos Neraca
dalam SAK ETAP

Bab 3
Pos-Pos Laba
Rugi SAK ETAP

5.1 Pengertian

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan Pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tak ada jasa timbal balik dari negara untuk memelihara kesejahteraan secara umum. (S.I. Djajadiningrat, Wikipedia,2010).

5.2 Unsur-Unsur Pajak

Unsur-Unsur Pajak adalah :

a. Iuran atau pungutan

Dilihat dari segi arah pajak, jika arah datangnya pajak berasal dari Wajib Pajak (WP), maka pajak disebut iuran, sedangkan jika arah datangnya kegiatan untuk

mewujudkan pajak tersebut berasal dari Pemerintah, maka pajak itu disebut sebagai pungutan.

b. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang

Pada hakekatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh masyarakat banyak, sehingga dalam perumusan jenis dan berat ringannya tarif pajak itu, rakyat harus ikut serta menentukan dan menyetujuinya, melalui wakil-wakilnya di parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

c. Pajak dapat Dipaksakan

Fiskus (otoritas pajak) mendapat wewenang dari undang-undang untuk memaksa Wajib Pajak agar mematuhi kewajiban perpajakannya. Wewenang tersebut dapat dilihat dengan adanya ketentuan sanksi-sanksi administratif maupun sanksi pidana fiskal dalam undang-undang perpajakan, khususnya dalam undang-undang KUP.

d. Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi

Ciri utama pajak adalah Wajib pajak yang membayar pajak tidak menerima atau memperoleh jasa timbal atau kontraprestasi dari Pemerintah, karena dana yang dibayarkan digunakan untuk memelihara kesejahteraan umum.

e. Untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah

Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintahan. Dana yang diterima dari pemungutan pajak dalam pengertian definisi diatas tidak pernah ditujukan untuk sesuatu pengeluaran khusus.

5.1	Pengertian
5.2	Unsur-Unsur Pajak
5.3	Pembagian Pajak
5.4	Sistem Pemungutan Pajak
5.5	Asas Pemungutan Pajak
5.6	Pendaftaran
5.7	Pelaporan
5.8	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
5.9	Pajak Penghasilan Badan
5.10	Koreksi Fiskal Positif dan Negatif
5.11	Pajak Penghasilan Pasal 22,23
5.12	Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2)
5.13	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

5.3 Pembagian Pajak

Pembagian atau penggolongan pajak didasarkan pada kriteria tertentu, yaitu dari siapa yang membayar pajak, siapa yang memungut pajak, serta sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan.

Berikut ini adalah pembagian jenis pajak berdasarkan kriteria tersebut.

1. Pajak menurut Golongan

- a. Pajak Langsung ; adalah pajak yang pembebanannya langsung kepada WP yang berkewajiban membayar pajaknya. Ini artinya WP yang bersangkutan yang harus memikul beban pajak dan beban pajak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak Tidak Langsung ; adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Pajak ini dipungut oleh WP dalam hal ini adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2. Pajak menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang waktu pengenaannya diutamakan pada subjek pajaknya. Setelah subjeknya diketahui barulah menentukan objeknya, contoh : Subjeknya WP dan objeknya adalah Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang waktu pengenaannya diutamakan pada objeknya, setelah objeknya diketahui

- 5.1 Pengertian
- 5.2 Unsur-Unsur Pajak
- 5.3 Pembagian Pajak
- 5.4 Sistem Pemungutan Pajak**
- 5.5 Asas Pemungutan Pajak
- 5.6 Pendaftaran
- 5.7 Pelaporan
- 5.8 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
- 5.9 Pajak Penghasilan Badan
- 5.10 Koreksi Fiskal Positif dan Negatif
- 5.11 Pajak Penghasilan Pasal 22,23
- 5.12 Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2)
- 5.13 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

barulah menentukan subjeknya, contoh : PPN dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Institusi Pemungutan
 - a. Pajak Pusat adalah pajak yang diadministrasikan Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan yakni Direktorat Jenderal Pajak, misalnya adalah PPh dan PPN.
 - b. Pajak daerah adalah pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Daerah. Pajak Daerah dibedakan antara Pajak Provinsi dan Pajak kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari empat macam pajak yakni : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air di Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan bahan Golongan C.

5.4 Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat empat sistem pemungutan pajak menurut Mansury (2002) yaitu sebagai berikut :

1. *Official Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh seseorang berada pada pemungut atau aparatur pajak, dalam hal ini WP bersifat pasif, menunggu ketetapan aparatur pajak, hutang baru timbul bila sudah ada surat ketetapan pajak dari aparatur pajak. Dengan demikian

5.1	Pengertian
5.2	Unsur-Unsur Pajak
5.3	Pembagian Pajak
5.4	Sistem Pemungutan Pajak
5.5	Asas Pemungutan Pajak
5.6	Pendaftaran
5.7	Pelaporan
5.8	Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21
5.9	Pajak Penghasilan Badan
5.10	Koreksi Fiskal Positif dan Negatif
5.11	Pajak Penghasilan Pasal 22,23
5.12	Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2)
5.13	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur pajak karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada aparatur pajak.

2. *Self Assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang berada pada WP. Dalam sistem ini WP aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam perhitungan besarnya pajak terhutang kecuali WP menyalahi aturan.
3. *Full Self Assessment System* yaitu suatu sistem perpajakan dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang berada pada WP itu sendiri. Jadi menghitung, menyetor dan melaporkan dilakukan oleh WP itu sendiri, sama halnya dengan *Self Assessment system*.
4. *Semi Full Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak campuran antara *Self Assessment* dan *Official Assessment*.

5.5 Asas Pemungutan Pajak

Terdapat 3 (tiga) asas pemungutan pajak, yakni :

1. Asas domisili atau tempat tinggal

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan WP yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayahnya baik atas penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Asas ini dipakai pada PPH WP Orang Pribadi atau Badan di Indonesia sehingga setiap WP Dalam negeri dikenakan

5.1	Pengertian
5.2	Unsur-Unsur Pajak
5.3	Pembagian Pajak
5.4	Sistem Pemungutan Pajak
5.5	Asas Pemungutan Pajak
5.6	Pendaftaran
5.7	Pelaporan
5.8	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
5.9	Pajak Penghasilan Badan
5.10	Koreksi Fiskal Positif dan Negatif
5.11	Pajak Penghasilan Pasal 22,23
5.12	Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2)
5.13	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

pajak atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperolehnya dari Indonesia dan dari luar Indonesia.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber atau berasal dari wilayahnya tanpa memperhatikan dimana tempat tinggal WP apakah di wilayahnya atau diluar wilayahnya. Ini berarti setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia dikenakan PPh. Asas ini dipakai pada PPh pasal 26, untuk WP luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Pajak yang dikenakan kepada WP luar negeri hanya atas penghasilan dari Indonesia dan segala penghasilan lainnya yang diterima Wp luar negeri dari luar Indonesia tidak dapat dikenakan pajak oleh Indonesia karena WP tersebut adalah WP luar negeri.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan status kewarganegaraan atau kebangsaan seorang WP. Contoh adalah pajak bangsa asing yang dahulu pernah berlaku di Indonesia, besarnya pajak ini berbeda sesuai dengan kewarganegaraan atau kebangsaan seorang WP.

5.6 Pendaftaran

Pendaftaran menjadi WP menjadi langkah awal pemenuhan kewajiban perpajakan. Seorang individu atau badan usaha menjadi WP karena memiliki penghasilan. Setiap individu atau badan usaha pasti melakukan kegiatan ekonomi dalam

rangka memperoleh penghasilan untuk membiayai dan menjalankan kehidupannya. Oleh karena itu tahap pertama memenuhi kewajiban perpajakan adalah menjadi WP dan memiliki NPWP.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan ekonomi atau kegiatan usaha, WP yang memenuhi syarat yang diatur Undang-undang PPN dapat menjadi PKP.

Oleh karena itu, setiap WP sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN, sesuai sistem self assessment wajib melakukan usahanya pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP. WP orang pribadi dan badan yang memenuhi ketentuan sebagai PKP, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

PKP adalah pengusaha yang melakukan barang kena pajak (BKP) dan/atau penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN.

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya :

- a. Menghasilkan barang,
- b. Mengimpor barang,
- c. Mengekspor barang,
- d. Melakukan usaha perdagangan,
- e. Memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean,
- f. Melakukan usaha jasa, atau
- g. Memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Dengan demikian pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha di wilayah beberapa kantor DJP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP baik di Kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha maupun di Kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

Fungsi pengukuhan PKP selain dipergunakan untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban dibidang PPN dan PPnBM serta untuk pengawasan administrasi perpajakan. Terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai PKP, tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengusaha kecil seperti yang diatur dalam UU No. 42 Tahun 2009 (UU PPN) tidak wajib menjadi PKP. Pengusaha kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000, namu jika pengusaha kecil :

- a. Memilih menjadi PKP, atau
- b. Tidak memilih sebagai PKP tetapi sampai dengan suatu bulan dalam suatu tahun buku jumlah nilai peredaran bruto atas penyerahan BKP atau JKP telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lama akhir bulan berikutnya.

5.1	Pengertian
5.2	Unsur-Unsur Pajak
5.3	Pembagian Pajak
5.4	Sistem Pemungutan Pajak
5.5	Asas Pemungutan Pajak
5.6	Pendaftaran
5.7	Pelaporan
5.8	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
5.9	Pajak Penghasilan Badan
5.10	Koreksi Fiskal Positif dan Negatif
5.11	Pajak Penghasilan Pasal 22,23
5.12	Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2)
5.13	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

5.7 Pelaporan

Setelah memenuhi kewajiban perpajakan yaitu pendaftaran, maka WP maupun PKP wajib mengisi dan melaporkan pajak terutangya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang format dan tata cara pengisiannya telah diatur atau ditentukan oleh direktur Jenderal Pajak.

Pengertian dan Jenis-jenis SPT :

SPT adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan penghitungan dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

SPT terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu :

- a. **SPT Tahunan** adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender (Januari s/d Desember) kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun pajak.
- b. **SPT Masa** adalah SPT untuk suatu Masa Pajak. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Masa Pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau

dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bentuk dan isi SPT :

1. SPT Tahunan sekurang-kurangnya memuat jumlah peredaran usaha, jumlah penghasilan termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, serta harta dan kewajiban di luar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bagi WP orang pribadi, tanggal pembayaran PPh WP yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

SPT Tahunan PPh terdiri dari :

- a. SPT Tahunan PPh WP Badan
 - b. SPT Tahunan PPh WP Badan yang diijinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat
 - c. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi
SPT berbentuk formulir kertas (*hardcopy*) atau *e-SPT*. *e-SPT* adalah data SPT WP dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh WP dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* yang disediakan oleh DJP.
2. SPT Masa terdiri dari :
 - a. SPT Masa PPh
 - SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26;

- 5.1 Pengertian
- 5.2 Unsur-Unsur Pajak
- 5.3 Pembagian Pajak
- 5.4 Sistem Pemungutan Pajak
- 5.5 Asas Pemungutan Pajak
- 5.6 Pendaftaran
- 5.7 Pelaporan
- 5.8 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**
- 5.9 Pajak Penghasilan Badan
- 5.10 Koreksi Fiskal Positif dan Negatif
- 5.11 Pajak Penghasilan Pasal 22,23
- 5.12 Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2)
- 5.13 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- SPT Masa PPh pasal 4 ayat (2); dan
- SPT Masa PPh Pasal 15.

b. SPT Masa PPN terdiri dari :

- SPT Masa PPN; dan
- SPT Masa PPN bagi pemungut PPN

SPT Masa PPN memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP), jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.

5.8 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Gambar 5.1
Format Perhitungan PPh Pasal 21

Gaji	: A
Tunjangan	: B
Penghasilan Kotor	: A + B = C
Tunjangan Jabatan	: D
Penghasilan Bersih	: C - D = E
PTKP	: F
PKP	: E - F = G
PPh Ps. 17 (Tarif Progressif)	: H
PPh Ps. 21 Terutang	: I

- 5.1 Pengertian
- 5.2 Unsur-Unsur Pajak
- 5.3 Pembagian Pajak
- 5.4 Sistem Pemungutan Pajak
- 5.5 Asas Pemungutan Pajak
- 5.6 Pendaftaran
- 5.7 Pelaporan
- 5.8 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
- 5.9 Pajak Penghasilan Badan**
- 5.10 Koreksi Fiskal Positif dan Negatif
- 5.11 Pajak Penghasilan Pasal 22,23
- 5.12 Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2)
- 5.13 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

5.9 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan (disingkat PPh) dikenakan terhadap Wajib Pajak dalam satu periode tertentu yang dinamakan tahun pajak. Berdasarkan hal ini, maka perhitungan dan penghitungan PPh dilakukan setahun sekali yang dituangkan dalam SPT Tahunan. Perhitungan PPh dilakukan setahun sekali setelah satu tahun tersebut berakhir dan menunggu laporan keuangan selesai dibuat. Agar pembayaran pajak tidak dilakukan sekaligus yang tentunya akan memberatkan, maka dibuatlah mekanisme pembayaran pajak di muka atau pembayaran cicilan setiap bulan. Pembayaran angsuran atau cicilan ini dinamakan Pajak Penghasilan Pasal 25.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 dan diperbaharui dengan PMK Nomor 208/PMK.03/2009 maka besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, kecuali Wajib Pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (stakeholder) dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak yang lalu, dibagi 12.

5.1	Pengertian
5.2	Unsur-Unsur Pajak
5.3	Pembagian Pajak
5.4	Sistem Pemungutan Pajak
5.5	Asas Pemungutan Pajak
5.6	Pendaftaran
5.7	Pelaporan
5.8	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
5.9	Pajak Penghasilan Badan
5.10	Koreksi Fiskal Positif dan Negatif
5.11	Pajak Penghasilan Pasal 22,23
5.12	Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2)
5.13	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) belum disahkan, maka besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum bulan pengesahan adalah sama dengan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya.

Gambar 5.2
Format Perhitungan PPh Badan :

Penghasilan	:	A
Beban	:	B
Laba Sebelum Pajak	:	$A + B = C$
Koreksi Fiskal :		
- Koreksi Positif	:	D
- Koreksi Negatif	:	F
Kredit Pajak		
- PPh Ps. 23	:	H
- PPh ps. 25	:	I
Jumlah Kredit Pajak	:	$H + I = J$
Penghasilan Kena Pajak	:	$G - J = K$
- Tarif x K	:	Pajak PPh ps. 29 Terutang

5.10 Koreksi Fiskal Positif dan Negatif

Terdapat perbedaan dalam perlakuan penetapan pendapatan dan biaya menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000 dengan Standar Akuntansi Keuangan sebagai akibat dari adanya beda tetap dan beda sementara; perlakuan akuntansi terhadap perbedaan tersebut perlu dilakukan rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal; dan pengaruh perbedaan

tersebut terhadap laporan keuangan yaitu pada besarnya jumlah pajak terutang dan jumlah laba usaha. Koreksi Fiskal Positif adalah koreksi/penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh Badan Terhutangnya juga akan meningkat. Koreksi fiskal positif diantaranya:

1. Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan
2. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang PKP
3. Biaya yang diakui lebih kecil, seperti penyusutan, amortisasi, dan biaya yang ditangguhkan menurut WP lebih tinggi
4. Biaya yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
5. Biaya yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final

Koreksi Fiskal Negatif adalah koreksi/penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang membuat PPh badan terhutangnya juga akan menurun. Koreksi fiskal negatif diantaranya :

1. Biaya yang diakui lebih besar, seperti penyusutan menurut WP lebih rendah, selisih amortisasi, dan biaya yang ditangguhkan pengakuannya
2. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
3. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final.

Contoh perhitungan koreksi fiskal positif dan negative adalah sebagai berikut :

	2 0 1 4 Rp	2 0 1 3 Rp
Laba tahun berjalan	2,474,139,754.56	5,302,017,452.11
Koreksi fiskal positif :		
Tunjangan pajak	64,838,276.00	65,394,547.00
Biaya rapat dan tamu	82,310,600.00	148,466,700.00
Bantuan sosial	162,940,728.00	118,301,000.00
Penyisihan piutang Dana representative	187,952,000.00	201,600,000.00
Biaya hari besar dan pameran pembangunan	174,902,880.00	423,798,315.50
Biaya olah raga	56,589,700.00	56,830,500.00
Pakaian dinas pegawai	122,734,552.00	49,072,000.00
Kerugian beban pajak	17,909,528.00	-
Subsidi Sambungan MBR	976,875,612.00	-
Jumlah koreksi fiskal positif	1,847,053,876.00	1,063,463,062.50
Koreksi fiskal negatif :		
Bunga Deposito	-	-
Bunga & Jasa giro bank	118,482,280.09	92,741,304.02
Sumbangan untuk HUT PDAM	-	-
Pendapatan Lain-lain Diluar Usaha	14,123,877.53	46,288,956.04
Jumlah koreksi fiskal negatif	132,606,157.62	139,030,260.06
Laba kena pajak	4,188,587,472.94	6,226,450,254.55
Perhitungan pajak penghasilan :		
PKP yang mendapat fasilitas 50%	662,011,399.70	1,006,143,814.68
PKP yang tidak mendapat fasilitas 50%	3,526,576,073.24	5,220,306,439.87
Laba kena pajak	4,188,587,472.94	6,226,450,254.55
Tarif pajak		
PKP yang mendapat fasilitas 50%	82,751,424.96	125,767,976.84
PKP yang tidak mendapat fasilitas 50%	881,644,018.31	1,305,076,609.97
Pajak yang harus dibayar (PPH Pasal 29)	964,395,443.27	1,430,844,586.80

- 5.1 Pengertian
- 5.2 Unsur-Unsur Pajak
- 5.3 Pembagian Pajak
- 5.4 Sistem Pemungutan Pajak
- 5.5 Asas Pemungutan Pajak
- 5.6 Pendaftaran
- 5.7 Pelaporan
- 5.8 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
- 5.9 Pajak Penghasilan Badan
- 5.10 Koreksi Fiskal Positif dan Negatif
- 5.11 Pajak Penghasilan Pasal 22,23**
- 5.12 Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2)
- 5.13 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

5.11 Pajak Penghasilan Pasal 22 & 23

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dipungut berkenaan dengan pembayaran atau penyerahan barang. Besarnya pembelian diatas Rp. 1.000.000. Besarnya PPh Pasal 22 adalah $1.5\% \times \text{Harga/Nilai Pembelian}$.

Contoh Perhitungan, misalnya PDAM dalam *corporate social responsibility* mencanangkan proyek penghijauan senilai 35.000.000 dengan rincian 22.000.000 untuk pembelian bibit tanaman dan 13.000.000 untuk jasa penanaman. Atas pembayaran untuk pembelian bibit dipungut PPh Pasal 22 sebagai berikut:

Harga pembelian = 22.000.000

Dasar Pengenaan Pajak = $20.000.000 \left(\frac{100}{110} \times 22.000.000 \right)$

PPh Pasal 22 $(1,5\% \times 20.000.000) = 300.000$

Pemungutan PPN Atas pembayaran untuk pembelian bibit dipungut PPN sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak = 20.000.000

PPN $(10\% \times 20.000.000) = 2.000.000$

Sedangkan untuk jasa penanaman dikenakan PPh Pasal 23.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Dari contoh di atas maka perhitungan PPh pasal 23 adalah sebesar : PPh Pasal 23 $(2\% \times 13.000.000) = 260.000$

5.1	Pengertian
5.2	Unsur-Unsur Pajak
5.3	Pembagian Pajak
5.4	Sistem Pemungutan Pajak
5.5	Asas Pemungutan Pajak
5.6	Pendaftaran
5.7	Pelaporan
5.8	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
5.9	Pajak Penghasilan Badan
5.10	Koreksi Fiskal Positif dan Negatif
5.11	Pajak Penghasilan Pasal 22,23
	5.12 Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2)
5.13	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

5.12 Pajak Penghasilan pasal 4 (2)

Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan yang merupakan *objek PPh Pasal 4 (2)* Undang-Undang no.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Yang menjadi objek pajak PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final antara lain :

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya
2. Bunga obligasi dan surat utang Negara
3. Bunga simpanan anggota yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
4. Penghasilan berupa hadiah undian
5. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
6. penghasilan dari transaksi pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (harta berupa tanah dan/atau bangunan dan usaha real estate).
7. Persewaan tanah dan/atau bangunan.

Tarif Pajak PPh Pasal 4(2) untuk Jasa Perencanaan Konstruksi dan Jasa Pengawasan Konstruksi adalah 4% untuk kontraktor yang memiliki sertifikat kualifikasi usaha (SBU) atau 6% untuk kontraktor yang tidak memiliki sertifikat kualifikasi usaha (SBU)

5.1	Pengertian
5.2	Unsur-Unsur Pajak
5.3	Pembagian Pajak
5.4	Sistem Pemungutan Pajak
5.5	Asas Pemungutan Pajak
5.6	Pendaftaran
5.7	Pelaporan
5.8	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
5.9	Pajak Penghasilan Badan
5.10	Koreksi Fiskal Positif dan Negatif
5.11	Pajak Penghasilan Pasal 22,23
5.12	Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2)
5.13	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

5.13 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PKP adalah "pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini."

Bila penghasilan usaha mencapai Rp 4.8 Miliar dalam tahun berjalan, maka perusahaan wajib mendaftarkan usaha menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 revisi atas PP Nomor 31 tahun 2007 tentang penyerahan Air Bersih (Barang Kena Pajak) dibebaskan dari pengenaan PPN. Untuk penjualan paket Sambungan Baru tetap harus diperhitungkan kewajiban PPN yang harus di setor dengan mengurangi Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan.

BAB VI

ANALISA LAPORAN KEUANGAN

Bab 4
Laporan
Perubahan Modal,
Laporan Arus Kas,
Laba dan Catatan
atas Laporan
Keuangan SAK
ETAP

Bab 5
Perpajakan PDAM

Bab 6
Analisa Laporan
Keuangan

BAB 6

ANALISA LAPORAN KEUANGAN

Bab 1
Pendahuluan

Bab 2
Pos-Pos Neraca
dalam SAK ETAP

Bab 3
Pos-Pos Laba
Rugi SAK ETAP

6.1 Pengertian

6.1 Pengertian

Laporan keuangan dikeluarkan secara periodic oleh perusahaan untuk berbagai keperluan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Untuk mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan, maka pihak-pihak tersebut harus melakukan pengolahan dan analisa atas laporan keuangan perusahaan. Analisa rasio digunakan untuk menghitung dan menginterpretasikan rasio keuangan untuk melihat kinerja perusahaan. Dengan analisa rasio, dapat diketahui kondisi likuiditas, aktivitas, hutang dan profitabilitas.

Rasio likuiditas digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo. Rasio yang termasuk didalamnya adalah current ratio dan quick ratio.

Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur seberapa cepat perusahaan menghasilkan penjualan/cash (sering juga dikatakan sebagai ukuran efektifitas penggunaan aktiva).

Rasio yang termasuk didalamnya adalah inventory turnover, average collection period, average payment period, total aset turnover.

Rasio hutang melihat kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang, yang diukur melalui proporsi hutang dalam mendanai aktiva maupun kemampuan memenuhi beban tetapnya. Rasio yang termasuk antara lain : debt ratio, times interest earned ratio, dan fixed-payment coverage ratio.

Rasio Profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba, yang dikaitkan dengan penjualan, aset dan investasi pemegang saham. Rasio yang termasuk antara lain : profit margin ratios, return on total aset, earning per share, dan return on common equity.

Regulasi untuk Analisa Laporan Keuangan adalah Permendagri No. 47 tahun 1999 dan Penilaian Kinerja BPPSPAM.

1. Analisa Laporan Keuangan Permendagri No. 47 tahun 1999

PDAM dengan kinerja organisasi yang efektif dan efisien, dengan dilakukannya penilaian kinerja aspek keuangan ini, maka segala pengambilan keputusan dapat ditelaah apakah sudah dilakukan secara tepat dan objektif. Hal ini, juga berguna untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkan dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja periode berikutnya.

Tabel 6.1
Perhitungan kinerja aspek keuangan PDAM menurut Kepmendagri No.47 Tahun 1999

No	Indikator	Rumus	Nilai	
1	Rasio Laba Terhadap Aktiva Produktif	$\frac{\text{Laba sebelum Pajak}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100 \%$	> 10%	5
			> 7% - 10%	4
			> 3% - 7%	3
			> 0% - 3%	2
			≤ 0%	1
2	Rasio Laba Terhadap Penjualan	$\frac{\text{Laba sebelum Pajak}}{\text{P e n j u a l a n}} \times 100 \%$	> 20%	5
			> 14% - 20%	4
			> 6% - 14%	3
			> 0% - 6%	2
			≤ 0%	1
3	Rasio Aktiva Lancar Terhadap Utang Lancar	$\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$	> 1,75 - 2,00	5
			> 1,50 - 1,75	4
			> 1,25 - 1,50	3
			> 1,00 - 1,25	2
			≤ 1,00	1
4	Rasio Utang Jangka Panjang Terhadap Ekuitas	$\frac{\text{Utang Jangka Panjang}}{\text{Ekuitas}}$	< 0,5	5
			> 0,5 - 0,7	4
			> 0,7 - 0,8	3
			> 0,8 - 1,0	2
			≤ 1	1
5	Rasio Total Aktiva Terhadap Total Utang	$\frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Total Utang}}$	> 2,0	5
			> 1,7 - 2,0	4
			> 1,3 - 1,7	3
			> 1 - 1,3	2
			≤ 1,0	1
6	Rasio Biaya Operasi Terhadap Pendapatan Operasi	$\frac{\text{Biaya Operasi}}{\text{Pendapatan Operasi}}$	≤ 0,50	5
			> 0,50 - 0,65	4
			> 0,65 - 0,85	3
			> 0,85 - 1,00	2
			> 1,00	1

7	Rasio Laba Operasi sebelum Biaya Penyusutan terhadap Angsuran Pokok dan Bunga Jatuh Tempo	Laba Operasi sebelum Biaya Penyusutan ----- (Angsuran Pokok + Bunga) jatuh Tempo	> 2,0	5
			> 1,7 – 2,0	4
			> 1,3 – 1,7	3
			> 1,0 – 1,3	2
			≤ 1,0	1
8	Rasio Aktiva Produktif Terhadap Penjualan Air	Aktiva Produktif ----- Penjualan Air	≤ 2	5
			> 2,0 – 4,0	4
			> 4,0 – 6,0	3
			> 6,0 – 8,0	2
			> 8,0	1
9	Jangka Waktu Penagihan Piutang	Piutang Usaha ----- Jumlah Penjualan per hari	< 60	5
			> 60 – 90	4
			> 90 – 150	3
			> 150 – 180	2
			> 180	1
10	Efektifitas Penagihan	Rekening Tertagih ----- Penjualan Air	> 90%	5
			> 85% - 90%	4
			> 80% - 85%	3
			> 75% - 80%	2
			≤ 75%	1
11	Peningkatan rasio laba terhadap aktiva produktif Rasio laba terhadap aktiva produktif tahun ini – rasio laba terhadap aktiva produktif tahun lalu	Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif tahun ini - Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif tahun lalu	> 12%	5
			> 9% - 12%	4
			> 6% - 9%	3
			> 3% - 6%	2
			≤ 0% - 3%	1
12	Peningkatan rasio laba terhadap penjualan Rasio laba terhadap penjualan tahun ini - rasio laba terhadap penjualan tahun lalu	Rasio Laba thd Penjualan tahun ini - Rasio Laba terhadap Penjualan tahun lalu	> 12%	5
			> 9% - 12%	4
			> 6% - 9%	3
			> 3% - 6%	2
			≤ 0% - 3%	1

2. Analisa Laporan Keuangan BPPSPAM

BPPSPAM melakukan evaluasi kinerja penyelenggara SPAM PDAM menggunakan 4 (empat) indikator yang diterapkan sejak tahun 2010 sebagai berikut :

1. Aspek Keuangan, bobot 25%, meliputi ;
 - a. *Return On Equity*, dimana *ratio* tersebut mengukur kemampuan pengembalian terhadap jumlah *equity*.
 - b. *Operating Ratio*, dengan tujuan untuk mengukur besarnya biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh pendapatan.
 - c. *Cash Ratio*, untuk mengukur kemampuan kas untuk menutupi hutang yang jatuh tempo.
 - d. *Efektivitas* penagihan, untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam hal penarikan piutang perusahaan.
 - e. *Solvabilitas*, untuk mengukur kemampuan perusahaan terhadap semua kewajibannya melalui aset yang dimilikinya.
2. Aspek Pelayanan, bobot 25%, meliputi :
 - a. Cakupan Pelayanan Teknis, mengukur berapa besar penduduk dalam wilayah pelayanan yang telah dilayani.
 - b. Pertumbuhan Pelanggan, mengukur besaran penambahan pelanggan dalam jangka waktu setahun.
 - c. Tingkat Penyelesaian Aduan, mengukur tindak lanjut atau penyelesaian pengaduan pelanggan.

- d. Kualitas Air Pelanggan, mengukur/menilai kualitas air yang telah memenuhi syarat.
 - e. Konsumsi air, untuk mengukur efektivitas pengelolaan sistem distribusi dan pelayanan terhadap pelanggan Rumah Tangga.
3. Aspek Operasional, bobot 35%, meliputi :
- a. Efisiensi produksi, untuk mengukur efisiensi sistem produksi.
 - b. Tingkat kehilangan air, untuk mengukur efisiensi sistem distribusi terhadap penjualan air.
 - c. Jam operasi pelayanan, untuk mengukur efisiensi sistem secara keseluruhan dan kaitannya dengan pelayanan.
 - d. Tekanan air pada sambungan pelanggan, mengukur jumlah pelanggan yang dilayani dengan tekanan yang sesuai dengan standar minimal.
 - e. Penggantian/kalibrasi meter air pelanggan, mengukur tingkat ketelitian meter air pelanggan.
4. Aspek Sumber Daya Manusia, bobot 15%, meliputi :
- a. Rasio Pegawai terhadap 1000 pelanggan, untuk mengukur efisiensi penggunaan tenaga kerja dalam melayani setiap 1000 pelanggan.
 - b. Rasio Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, mengukur kepedulian perusahaan untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
 - c. Rasio Biaya Pendidikan dan Pelatihan, mengukur kepedulian perusahaan untuk mendanai dalam hal peningkatan kemampuan pegawai.

Nilai maksimum dari masing – masing aspek tersebut adalah 5, sehingga nilai tertinggi menjadi :

Aspek	Bobot	Nilai Maksimum	Skoring
Keuangan	0.25	5	1.25
Pelayanan	0.25	5	1.25
Operasional	0.35	5	1.75

Evaluasi Kinerja PDAM yang dilakukan berdasarkan kriteria baru tersebut, dikelompokkan kedalam 3 kategori yakni; Sehat, Kurang Sehat, dan Sakit, dengan batasan nilai :

1. Kategori Sehat, memperoleh nilai lebih besar dari 2,8 PDAM dengan kategori sehat adalah PDAM yang mampu berkembang dan dapat memperbaiki kas dan kewajiban pinjaman, dan melakukan mengoperasikan instalasi secara efisien dalam pelayanannya kepada pelanggan.

2. Kategori Kurang Sehat, memperoleh nilai antara 2.2–2,8

PDAM dengan kategori kurang sehat adalah PDAM yang menanggung risiko atas keadaan kas dan pembayaran pinjaman dalam mengembangkan pelayanannya.

3. Kategori Sakit, memperoleh nilai kurang dari 2.2

PDAM dengan kategori sakit adalah PDAM yang tidak mampu menanggung risiko kas dan pinjaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Disamping mekanisme analisis Laporan Keuangan sebagaimana di atas, ada beberapa rasio lain yang dapat dijadikan pelengkap analisa sebagai berikut :

Tabel 6.2
Tabel Rumus Perhitungan FCR

1	<i>Full Cost Recovery</i>	Jumlah total Beban ----- m3 air terjual
2	Biaya dasar	Jumlah total Beban ----- 80% X Produksi
3	Harga rata-Rata Air	Jumlah Penjualan Air ----- m3 air terjual

Kondisi ideal adalah FCR	\approx	Biaya Dasar
FCR - Biaya Dasar	\approx	<i>Non Revenue Water</i>
Harga Rata-Rata Air	\approx	110% FCR

HANDOUT

Modul SAK ETAP Buku 2

SESI 1
POS-POS NERACA DALAM SAK ETAP

BAB 1

POS POS NERACA SAK ETAP

Buku **02**

Judul Buku: : LAPORAN KEUANGAN PDAM BERDASARKAN SAK ETAP

Judul Pelatihan : SAK ETAP

PENDAHULUAN



- **Komponen laporan keuangan**
 - **Neraca**
 - **Aset**
 - **Kewajiban**
 - **Ekuitas**
 - **Laporan laba rugi**
 - **Penghasilan**
 - **Beban**
 - **Beban pajak**
 - **Laba rugi neto**
 - **Laporan perubahan ekuitas**
 - **Laporan arus kas – metode tidak langsung**
 - **Catatan atas laporan keuangan**
 - **Pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai SAK-ETAP**
 - **Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan**
 - **Informasi tambahan**
 - **Pengungkapan lain**

NERACA



Neraca adalah laporan yang menyajikan posisi Aset, Kewajiban dan Modal dari suatu Perusahaan pada suatu saat tertentu.

Neraca disajikan secara komparatif dengan neraca tahun sebelumnya

NERACA



- Neraca menggambarkan posisi keuangan yang terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas
 - Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh PDAM akibat peristiwa masa lalu dan diharapkan akan diperoleh manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Manfaat ekonomi → sumbangan terhadap aliran kas / setara kas
 - Kewajiban adalah utang masa kini PDAM akibat peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya mengakibatkan keluarnya sumber daya yang dimiliki PDAM. Kewajiban hukum → kewajiban yang timbul karena kontrak atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban konstruktif → kewajiban yang timbul dari tindakan PDAM masa lalu yang menimbulkan ekspektasi kuat dan sah kepada pihak lain bahwa PDAM akan menerima dan melaksanakan tanggung jawab tersebut
 - Ekuitas adalah hak residual atas aset suatu perusahaan setelah dikurangi kewajiban

NERACA



- Penyajian
 - Klasifikasi aset lancar dan aset tidak lancar
 - Klasifikasi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang

NERACA



- **Pos-pos neraca**
 - Aset Lancar**
 - Kas dan setara kas
 - Investasi jangka pendek
 - Piutang Usaha
 - Piutang non Usaha
 - Persediaan
 - Pembayaran dimuka
 - Aset Tidak Lancar**
 - Aset Tetap
 - Investasi Jangka Panjang
 - Aset Tetap Leasing
 - Properti Investasi
 - Aset Tak Berwujud
 - Aset Tetap dalam Penyelesaian
 - Kewajiban Jangka Pendek**
 - Utang usaha
 - Utang non usaha
 - Beban yang Masih Harus Dibayar
 - Pendapatan Diterima Dimuka
 - Utang Jangka Pendek
 - Kewajiban Jangka Panjang**
 - Utang kepada Pemerintah
 - Utang Leasing
 - Ekuitas**
 - Kekayaan Pemda Dipisahkan
 - Modal Hibah
 - Bantuan yang Belum Ditetapkan Statusnya
 - Laba Ditahan / (Akumulasi Kerugian)
 - Laba (Rugi) Tahun Berjalan

CONTOH FORMAT NERACA



**FORMAT NERACA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN/KOTA "XX"
NERACA
PER 31 DESEMBER ..X1 DAN ..X0**

URAIAN	..X1	..X0	URAIAN	..X1	..X0
		0			
ASET LANCAR : <ul style="list-style-type: none"> • Kas dan bank • Investasi jangka pendek • Piutang usaha • Persediaan • Pembayaran dimuka <p style="text-align: right;">Jumlah aset lancar</p>			KEWAJIBAN JK PENDEK <ul style="list-style-type: none"> • Utang usaha • Utang non usaha • Biaya yang masih harus dibayar • Pendapatan diterima dimuka • Pinjaman jangka pendek • Utang jk panjang jatuh tempo • Utang bunga • Utang iuran pensiun <p style="text-align: right;">Jumlah kewajiban jk pendek</p>		
ASET TIDAK LANCAR ASET TETAP <ul style="list-style-type: none"> • Nilai perolehan • Akumulasi Penyusutan <p style="text-align: right;">Nilai buku</p> <p>Aktiva Tetap Leasing</p>			KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Kewajiban jangka panjang: <ul style="list-style-type: none"> • Pinjaman dalam negeri • Pinjaman luar negeri • Bunga masa tenggang • Utang leasing • Rupa-rupa kewajiban lain <p style="text-align: right;">Jumlah kewajiban Jk Panjang</p>		
ASET TIDAK LANCAR LAINNYA : <ul style="list-style-type: none"> • Aset tak berwujud <p style="text-align: right;">Jumlah aset tidak lancar</p>			EKUITAS : <ul style="list-style-type: none"> • Kekayaan Pemda yang dipisahkan • Penyertaan pemerintah yg belum berstatus • Modal • Modal hibah • Cadangan • Laba ditahan / (akumulasi kerugian) • Laba (rug) tahun berjalan <p style="text-align: right;">Jumlah ekuitas</p>		
JUMLAH AKTIVA			JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL		

SESI 2
POS-POS LABA RUGI SAK ETAP

BAB 2

POS-POS LABA RUGI SAK ETAP

Buku **02**

Judul Buku: LAPORAN KEUANGAN PDAM BERDASARKAN SAK ETAP

Judul Pelatihan: SAK ETAP

LAPORAN LABA RUGI



- Laporan laba rugi adalah laporan yang menggambarkan informasi mengenai pendapatan dan beban, serta laba yang diperoleh atau rugi yang diderita oleh perusahaan selama suatu periode tertentu
- Laporan Laba Rugi merupakan upaya untuk mengukur hasil bersih dari operasi perusahaan selama kurun waktu tertentu

Rumus :

$$\text{Total Pendapatan} - \text{Beban} = \text{Laba} / \text{Rugi}$$

LAPORAN LABA RUGI



Informasi yang disajikan dalam laporan Laba Rugi adalah :

1. Pendapatan

- Merupakan peningkatan manfaat ekonomis yang timbul dari aktivitas normal PDAM selama suatu periode yang menghasilkan arus kas masuk, bertambahnya aset, dan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal, meliputi :
 - Pendapatan air dan non air
 - Pendapatan penggunaan aset oleh pihak lain yang menghasilkan sewa, bunga, royalti, deviden
 - Pendapatan penjualan lain seperti sambungan langganan baru

LAPORAN LABA RUGI



2. Beban

Adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada pemilik modal

- Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas → beban pembelian air baku, beban pemakaian bahan kimia, beban pemeliharaan, beban pegawai, beban penyusutan, beban bunga
- Kerugian → memenuhi definisi beban tetapi tidak terkait dengan aktivitas operasional → kerugian penjualan aset tetap, kerugian penjualan investasi, kerugian penurunan nilai, kerugian penurunan nilai investasi, kerugian penurunan persediaan

LAPORAN LABA RUGI



3. Beban pajak;

- ⦿ Merupakan jumlah pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan perpajakan berdasarkan laba yang diperoleh

4. Laba atau Rugi neto;

- ⦿ Adalah Jumlah residual yang tersisa setelah pendapatan dikurangi beban dan pajak
- Tidak ada penyajian pos luar biasa

LAPORAN LABA RUGI



■ Analisis Beban

- ⦿ Berdasarkan SAK ETAP (paragraph 5.6; 5.7 dan 5.8) Perusahaan dianjurkan menyajikan klasifikasi beban dalam laporan laba rugi berdasarkan sifat beban, bilamana penyajian beban berdasarkan fungsi beban maka wajib mengungkap dalam informasi tambahan berdasarkan sifat beban.

LAPORAN LABA RUGI



PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN/KOTA "XX"
LAPORAN LABA RUGI
PER 31 DESEMBER ..X1 DAN ..X0

URAIAN	..X1	..X0
PENDAPATAN USAHA :		
Pendapatan air		
Pendapatan non air		
- pendapatan sambungan baru;		
- Pendapatan dana meter		
- pendapatan sewa instalasi;		
- pendapatan pemeriksaan air lab;		
- pendapatan penyambungan kembali;		
- pendapatan pemeriksaan instalasi pelanggan;		
- pendapatan penggantian meter rusak;		
- pendapatan administrasi		
- Pendapatan denda		
- pendapatan penggantian pipa persil.		
- Pendapatan non usaha lainnya		
Pendapatan Lain - lain		
Jumlah Pendapatan		
BEBAN USAHA		
Beban operasional sumber air		
Beban pegawai		
Beban BBM		
Beban listrik		
Beban transportasi		
Beban komunikasi		
Beban penyusutan dan amortisasi		
Beban penyisihan		
Beban penurunan nilai		
Beban pemeliharaan sumber/IPA/inst Distrans		
Beban bunga		
Beban operasi lainnya		
Jumlah Beban Operasi		
Laba Operasi		

SESI 3
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS, LAPORAN ARUS KAS
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

BAB 3

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS, ARUS KAS DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Buku

02

Judul Buku: LAPORAN KEUANGAN PDAM BERDASARKAN SAK ETAP

Judul Pelatihan: SAK ETAP

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



Tujuan Laporan Perubahan Ekuitas :

Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi PDAM yang memuat pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui, jumlah investasi dan distribusi lain ke pemilik modal selama periode tersebut

- Menyajikan:
 - Laba rugi periode berjalan
 - Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas
 - Pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan.
 - Jumlah investasi dan distribusi lain ke pemilik semalam periode tersebut
- Rekonsiliasi jumlah tercatat awal dan akhir periode dari komponen ekuitas

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN/KOTA "XX"
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Uraian	Kekayaan Pemda yang dipisahkan	Penyertaan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya	Akumulasi Kerugian	Laba(Rugi) tahun berjalan	Jumlah Ekuitas
Saldo per 1 Januari 20X0	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Koreksi Saldo Awal Laba Rugi Tahun 20x0					
-Koreksi Audit	-----	-----	-----	-----	-----
-Mutasi Tahun Berjalan	Xxxx	Xxxx	xxxx	xxxx	Xxxx
Saldo per 31 Desember 20X0	Xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Koreksi Saldo Awal Laba Rugi Tahun 20x1					
-Koreksi Audit	-----	-----	-----	-----	-----
-Mutasi Tahun Berjalan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Saldo per 31 Desember 20X2	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxx

BUKU 02

SAK ETAP – LAPORAN KEUANGAN PDAM BERDASARKAN SAK ETAP

3

LAPORAN ARUS KAS



- Laporan arus kas bertujuan menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas yang menunjukkan secara terpisah perubahan pada satu periode dari aktivitas:
 - **Aktivitas operasi** → penghasil utama pendapatan (*principal revenue-producing activities*) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan
 - **Aktivitas investasi** → perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas
 - **Aktivitas pendanaan** (*financing*) → aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan

BUKU 02

SAK ETAP – LAPORAN KEUANGAN PDAM BERDASARKAN SAK ETAP

4

LAPORAN ARUS KAS



- Aktivitas operasi hanya dapat disajikan secara tidak langsung. Dengan mengkoreksi laba atau rugi neto dengan transaksi non kas, transaksi-transaksi akrual dan pendapatan yang berasal dari kegiatan non operasi
- Aktivitas pendanaan dan investasi menggunakan metode langsung
- PDAM mengungkapkan bersama pendapat manajemen jumlah kas dan setara kas yang signifikan yang dimiliki namun tidak dapat digunakan

LAPORAN ARUS KAS



PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN/KOTA "XX"
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER ...X1 DAN ...X0

Nama Akun	...X1	...X0	Lebih/(kurang)	
			Jumlah	%
Arus kas dari aktivitas operasi:				
• Laba sebelum pajak dan pos luar biasa				
• Penyesuaian: - penyusutan				
- beban bunga				
• Kenaikan (penurunan) utang lancar				
• Penurunan (kenaikan) aktiva lancar				
Arus kas bersih dari aktivitas operasi				
Arus kas dari aktivitas investasi				
• Penerimaan dari aktivitas investasi				
• Pengeluaran dari aktivitas investasi				
Arus kas bersih dari aktivitas investasi				
Arus kas dari aktivitas pendanaan				
• Penerimaan dari aktivitas pendanaan				
• Pengeluaran dari aktivitas pendanaan				
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan				
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas				
Saldo awal kas dan setara kas				
Saldo akhir kas dan setara kas				

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN (CaLK)



- Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan
- Disajikan secara sistematis dengan menggunakan *cross reference*:
 - Pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK ETAP.
 - Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan
 - Informasi tambahan yang disajikan dalam neraca, laporan perubahan ekuitas, arus kas dengan urutan penyajian pos
 - Pengungkapan lain seperti: kontijensi, komitmen kontraktual, kebijakan manajemen risiko dan ketidakpastian kelangsungan usaha

SESI 4
PERPAJAKAN PDAM

BAB 4

PERPAJAKAN PDAM

Buku **02**

Judul Buku: LAPORAN KEUANGAN PDAM BERDASARKAN SAK ETAP

Judul Pelatihan: SAK ETAP

PENGERTIAN PAJAK



Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan Pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tak ada jasa timbal balik dari negara untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

(S.I. Djadiningrat, Wikipedia,2010)

Unsur – Unsur Pajak



1. Iuran atau pungutan
2. Pajak Dipungut berdasarkan Undang-undang
3. Dapat Dipaksakan
4. Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi
5. Untuk membiayai pengeluaran Umum Pemerintah

Golongan Pajak :

1. Langsung → Pajak Penghasilan (PPh)
2. Tidak Langsung → Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pembagian Pajak



1. Pajak menurut Golongan :
 - a. Pajak langsung → PPh
 - b. Pajak Tidak Langsung → PPN dan PPnBM
2. Menurut Sifat :
 - a. Pajak Subjektif → WP dan PPh
 - b. Pajak Objektif → PPN dan PBB
3. Menurut Lembaga Institusi Pemungutan
 - a. Pajak Pusat → PPh dan PPN
 - b. Pajak Daerah → Pajak Kendaraan Bermotor, BBN KB, Pajak Bahan Bakar, Pajak Reklame, Pajak Hiburan



Sistem Pemungutan Pajak

1. Official Assesment System
2. Self Assesment System
3. Full Self Assesment System
4. Semi Full Self Assesment System

Asas Pemungutan Pajak

1. Asas Domisili atau tempat tinggal
2. Asas Sumber
3. Asas Kebangsaan

Pengusaha Kena Pajak (PKP)

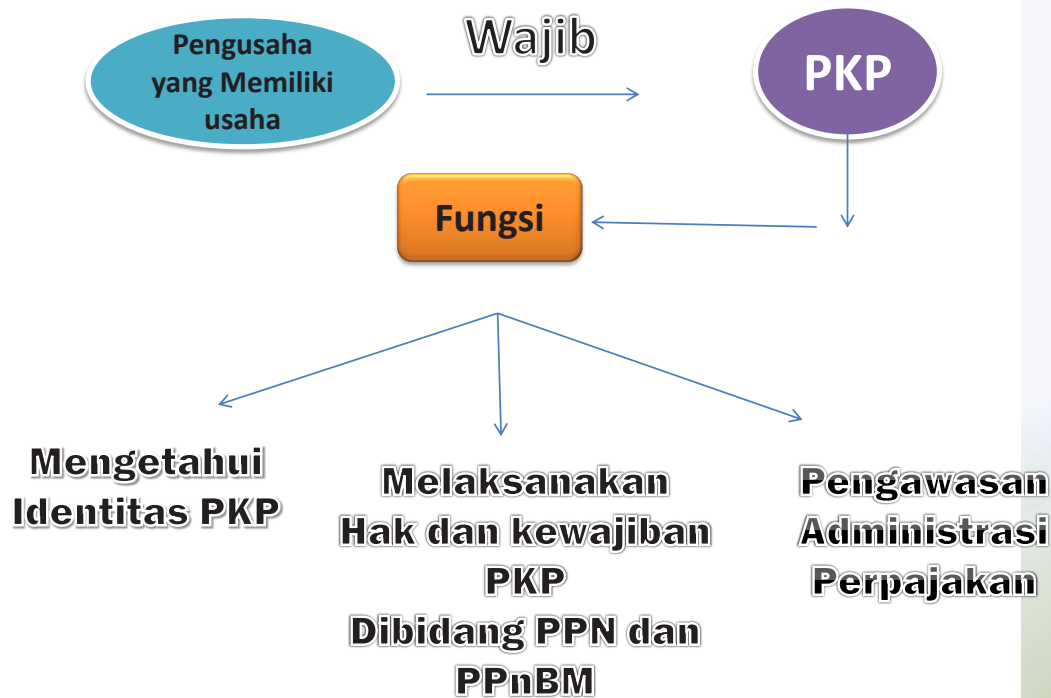


PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN.

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya :

- a. Menghasilkan barang
- b. Mengimpor barang
- c. Mengekspor barang
- d. Melakukan usaha perdagangan
- e. Memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean
- f. Melakukan usaha jasa, atau
- g. Memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean

Pengusaha Kena Pajak (PKP)



Surat Pemberitahuan (SPT)



SPT adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan penghitungan pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan

SPT terdiri dari :

1. SPT Tahunan → Untuk 1 tahun Pajak (Jan s.d Des)
 - a. SPT Tahunan PPh WP Badan
 - b. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi
2. SPT Masa → Untuk suatu Masa Pajak (1 bulan)
 - a. SPT Masa PPh : Pasal 21/26, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 29, Pasal 29, Pasal 15
 - b. SPT Masa PPN : Masa PPN dan Masa PPN bagi pemungut PPN

Pajak Penghasilan (PPH)

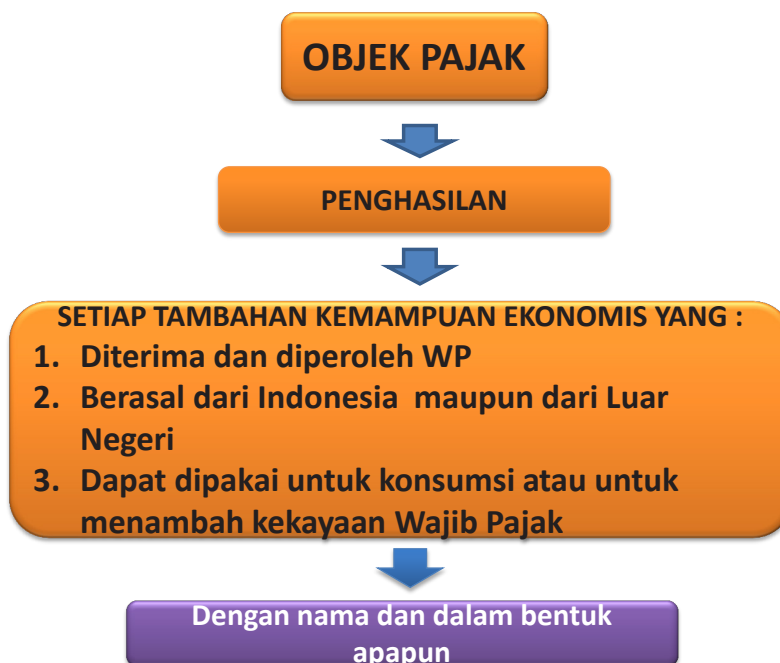


Pajak Penghasilan dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh Subyek pajak pada tahun pajak

Subyek Pajak Penghasilan (PPH) adalah :

- 1. Orang Pribadi**
- 2. Badan**
- 3. Badan Usaha Tetap (BUT)**

Objek Pajak Penghasilan (PPH)



PPh Pasal 21



PPh Pasal 21 adalah Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun

Gaji	:	A	
Tunjangan	:	B	
Penghasilan Kotor	:	$A + B = C$	
Tunjangan Jabatan	:	D	
Penghasilan Bersih	:	$C - D = E$	
PTKP	:	F	
PKP	:	$E - F = G$	
PPh Ps. 17 (Tarif Progressif)	:	H	
PPh Ps. 21 Terutang	:	<u>I</u>	

PPh Badan



PPh Badan adalah pajak atas penghasilan yang termasuk yang diperoleh oleh Wajib Pajak Badan selama periode Tahun Pajak

Penghasilan	:	A	
Beban	:	B	
Laba Sebelum Pajak	:	$A + B = C$	
Koreksi Fiskal :			
- Koreksi Positif	:	D	
	:	$C + D = E$	
- Koreksi Negatif	:	F	
	:	<u>$E - F = G$</u>	
Kredit Pajak			
- PPh Ps. 23	:	H	
- PPh ps. 25	:	I	
Jumlah Kredit Pajak	:	$H + I = J$	
Penghasilan Kena Pajak	:	$G - J = K$	
- Tarif x K	:	Pajak PPh ps. 29 Terutang	

Koreksi Fiskal



Koreksi Fiskal adalah sebuah lampiran SPT Tahunan PPh berupa kertas kerja yang berisi penyesuaian antara laba/rugi sebelum pajak menurut komersial/pembukuan dengan laba/rugi menurut SPT Tahunan

- ❖ Koreksi Fiskal Positif adalah koreksi/penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang akhirnya akan membuat PPh Badan terhutangny akan meningkat
- ❖ Koreksi Fiskal Negatif adalah koreksi/penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang membuat PPh badan terhutangny juga akan menurun

PPh Pasal 22 dan 23



- ❖ PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut berkenaan dengan pembayaran atau penyerahan barang

Tarif : 1,5 % x Harga Penyerahan

- ❖ PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21

Tarif : 2 % x Harga Perolehan

PPH Pasal 4 ayat (2)



PPH pasal 4 ayat (2) adalah pajak yang dikenakan terhadap :

- Penghasilan deposito dan tabungan
- Bunga obligasi dan Surat Utang Negara
- Bunga simpanan anggota yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
- Penghasilan berupa hadiah undian
- Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas
- Penghasilan dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
- Persewaan tanah dan/atau bangunan

Tarif : 4% untuk Jasa Perencanaan Konstruksi dan Jasa Pengawasan Konstruksi yang memiliki Sertifikat Kualifikasi Usaha (SBU) dan 6% untuk yang tidak memiliki SBU

SESI 5
ANALISA LAPORAN KEUANGAN

BAB 5

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

Buku **02**

Judul Buku: LAPORAN KEUANGAN PDAM BERDASARKAN SAK ETAP

Judul Pelatihan: SAK ETAP

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN



Laporan Keuangan :

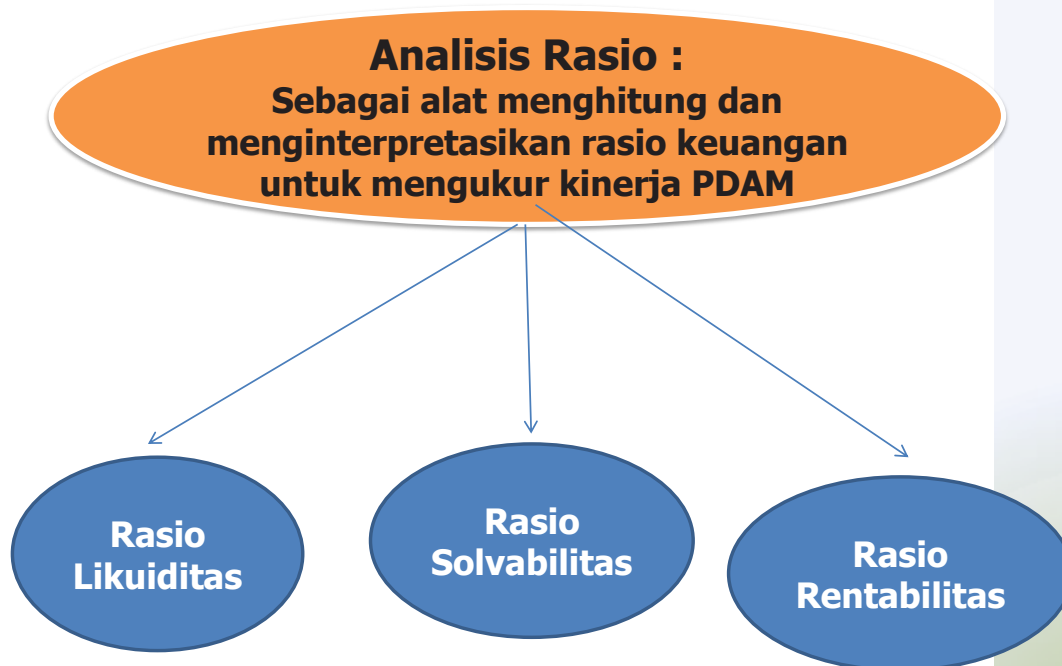
- 1. Alat untuk memperoleh informasi kondisi keuangan perusahaan**
- 2. Alat untuk menilai kinerja perusahaan**



Analisis Laporan keuangan :

- 1. Diketahui kondisi keuangan perusahaan**
- 2. Perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun**

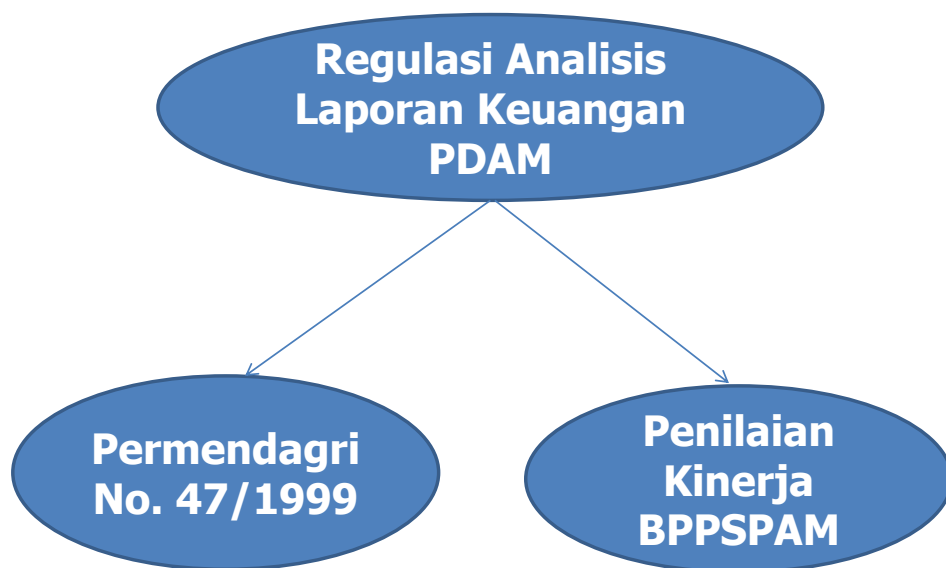
ANALISIS RASIO



ANALISIS RASIO



- ❖ Rasio Likuiditas → Mengukur kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo
- ❖ Rasio Solvabilitas → Mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemiliknya dengan dana yang dipinjam dari kreditur perusahaan tersebut
- ❖ Rasio Profitabilitas → Mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba/keuntungan



KEPMENDAGRI NO. 47/1999

KEPMENDAGRI No. 47 Tahun 1999 mengatur mekanisme pengukuran Kinerja PDAM dengan 12 indikator sebagai berikut:

No	Indikator	Rumus	Nilai	
1	Rasio Laba Terhadap Aktiva Produktif	$\frac{\text{Laba sebelum Pajak}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100 \%$	> 10%	5
			> 7% - 10%	4
			> 3% - 7%	3
			> 0% - 3%	2
			≤ 0%	1
2	Rasio Laba Terhadap Penjualan	$\frac{\text{Laba sebelum Pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100 \%$	> 20%	5
			> 14% - 20%	4
			> 6% - 14%	3
			> 0% - 6%	2
			≤ 0%	1
3	Rasio Aktiva Lancar Terhadap Utang Lancar	$\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$	> 1,75 - 2,00	5
			> 1,50 - 1,75	4
			> 1,25 - 1,50	3
			> 1,00 - 1,25	2
			≤ 1,00	1
4	Rasio Utang Jangka Panjang Terhadap Ekuitas	$\frac{\text{Utang Jangka Panjang}}{\text{Ekuitas}}$	< 0,5	5
			> 0,5 - 0,7	4
			> 0,7 - 0,8	3
			> 0,8 - 1,0	2
			≤ 1	1

KEPMENDAGRI NO. 47/1999



5	Rasio Total Aktiva Terhadap Total Utang	Total Aktiva	> 2,0	5
			> 1,7 - 2,0	4
		Total Utang	> 1,3 - 1,7	3
			> 1 - 1,3	2
			≤ 1,0	1
6	Rasio Biaya Operasi Terhadap Pendapatan Operasi	Biaya Operasi	≤ 0,50	5
			> 0,50 - 0,65	4
		Pendapatan Operasi	> 0,65 - 0,85	3
			> 0,85 - 1,00	2
			> 1,00	1

KEPMENDAGRI No. 47/1999



7	Rasio Laba Operasi sebelum Biaya Penyusutan terhadap Angsuran Pokok dan Bunga Jatuh Tempo	Laba Operasi sebelum Biaya Penyusutan	> 2,0	5
			> 1,7 - 2,0	4
		(Angsuran Pokok + Bunga) jatuh Tempo	> 1,3 - 1,7	3
			> 1,0 - 1,3	2
			≤ 1,0	1
8	Rasio Aktiva Produktif Terhadap Penjualan Air	Aktiva Produktif	≤ 2	5
			> 2,0 - 4,0	4
		Penjualan Air	> 4,0 - 6,0	3
			> 6,0 - 8,0	2
			> 8,0	1
9	Jangka Waktu Penagihan Piutang	Piutang Usaha	< 60	5
			> 60 - 90	4
		Jumlah Penjualan per hari	> 90 - 150	3
			> 150 - 180	2
			> 180	1
10	Efektifitas Penagihan	Rekening Tertagih	> 90%	5
			> 85% - 90%	4
		Penjualan Air	> 80% - 85%	3
			> 75% - 80%	2
			≤ 75%	1
11	Peningkatan rasio laba terhadap aktiva produktif Rasio laba terhadap aktiva produktif tahun ini - rasio laba terhadap aktiva produktif tahun lalu	Rasio Laba thd Aktiva Produktif thn ini - Rasio Laba thd Aktiva Produktif thn lalu	> 12%	5
			> 9% - 12%	4
			> 6% - 9%	3
			> 3% - 6%	2
			≤ 0% - 3%	1
12	Peningkatan rasio laba terhadap penjualan Rasio laba terhadap penjualan tahun ini - rasio laba terhadap penjualan tahun lalu	Rasio Laba thd Penjualan thn ini - Rasio Laba terhadap Penjualan thn lalu	> 12%	5
			> 9% - 12%	4
			> 6% - 9%	3
			> 3% - 6%	2
			≤ 0% - 3%	1

BPPSPAM melakukan penilaian Kinerja PDAM dengan menggunakan 4 (empat) indikator yaitu:

1. Aspek Keuangan → Bobot 25%
2. Aspek Pelayanan → Bobot 25%
3. Aspek Operasi → Bobot 35%
4. Aspek SDM → Bobot 15%

Kerja Sama Kementerian PUPR dan Kemitraan USAID - SECO



Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat



USAID
DARI RAKYAT AMERIKA



Swiss Confederation
Federal Department of Economic Affairs,
Education and Research EAER
State Secretariat for Economic Affairs SECO